

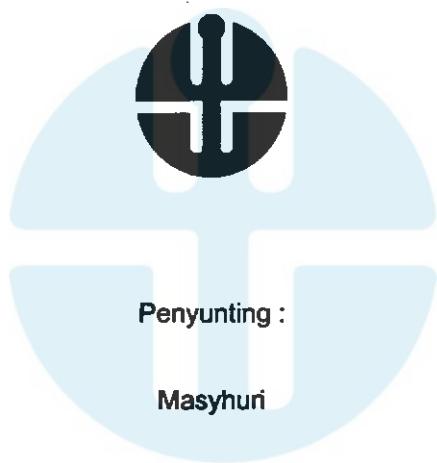
PEMBERDAYAAN NELAYAN TERTINGGAL : SEBUAH UJI MODEL PENANGANAN KEMISKINAN



Oleh:
Masyhuri
Mochammad Nadjib

**PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 2000**

PEMBERDAYAAN NELAYAN TERTINGGAL: SEBUAH UJI MODEL PENANGANAN KEMISKINAN



LIPI

**PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Jakarta, 2000**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Masyhuri, Mochammad Nadjib

Pemberdayaan Nelayan Tertinggal: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan/Penyunting,
Masyhuri. – Cet.1:

Masyhuri, Mochammad Nadjib

Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI (PEP-LIPI), 2000
ix, 71 hlm., 21 cm.

ISBN 979-9165-07-5

@ Hak pengarang dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2000

Dicetak oleh: CV. Raga Meulaba

Penerbit: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PEP-LIPI)

Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta

Telepon: 5251542, 5207120 (Langsung); Fax: 5262139



KATA PENGANTAR

Penelitian **PEMBERDAYAAN NELAYAN TERTINGGAL: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan**, merupakan salah satu dari sepuluh penelitian dan atau kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam Proyek Litbang Potensi Sumber Daya Alam dan Sosial Ekonomi Dan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah-LIPI Tahun Anggaran 1999/2000.

Sebelum menjadi laporan akhir, kegiatan penelitian dan atau pemberdayaan ini telah diuji melalui berbagai tahapan proses penelitian yang panjang dan sangat ketat dalam bentuk diskusi, seminar dan penilaian akhir oleh Tim "Quality Assurance" PEP-LIPI. Dengan demikian, laporan hasil penelitian dan atau kegiatan pemberdayaan ini, secara akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian dan atau pemberdayaan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Berkenaan dengan itu kami mengucapkan terima kasih. Kami juga sangat menghargai kerja keras para peneliti dan staf administrasi PEP-LIPI, sehingga berhasil menyajikan laporan penelitian ilmiah yang baik. Harapan kami semoga laporan ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pergetahuan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan atau kepentingan praktis lainnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran-saran konstruktif guna menyempurnaan laporan-laporan penelitian PEP-LIPI pada masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2000
Kepala Puslitbang Ekonomi dan
Pembangunan – LIPI

Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA. APU.
NIP: 320003805

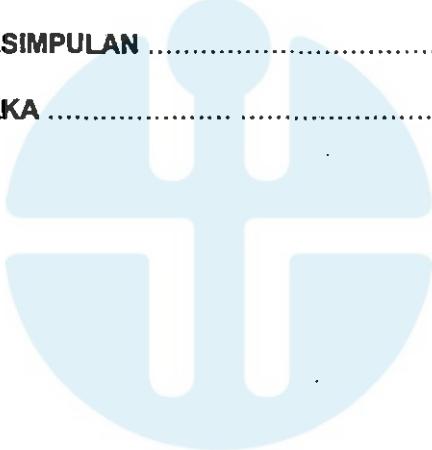


DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	2
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Metodologi	4
 BAB II : PEMILIKAN KELOMPOK DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	
2.1. Kemiskinan dan Ekonomi Nelayan	7
2.2. Pemilikan Individual dan Ketimpangan Pendapatan.....	13
2.3. Pemilikan Kelompok dan Pemerataan Pendapatan	20
2.4. Kerangka Konseptual Pemberdayaan Nelayan	25
 BAB III : PEMBERDAYAAN NELAYAN : Pengalaman Lapangan	
3.1. Lokasi Pemberdayaan	29
3.2. Latar Belakang Sosial Desa Kradenan	31
3.3. Teknik Pemilihan Kelompok dalam Pemberdayaan Nelayan	32
3.4. Forum Diskusi dan Pelatihan	36
3.4.1 Materi Pelatihan	36
3.4.2 Keterkaitan Program dengan Dinas Perikanan	38
3.5. Mekanisme Pengadaan Barang dan Pengelolaan Usaha.....	40
3.6. Organisasi Pelaksana Pemberdayaan	46
3.7. Manfaat Ekonomi Dari Pemberdayaan	48

BAB IV : POLA KELOMPOK DAN PROSPEKNYA

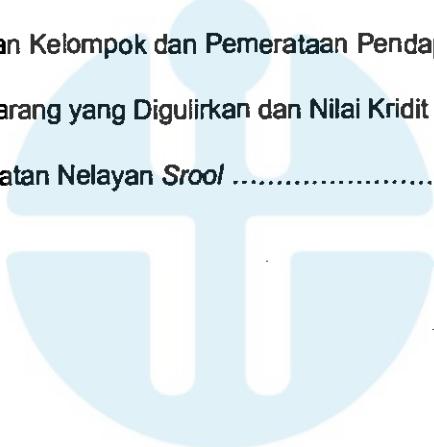
4.1.	Kerangka Kelembagaan	5
4.1.1.	Kelembagaan Kelompok Kerja	52
4.1.2.	Kelembagaan “Dana Darurat”	53
4.1.3.	Kelembagaan yang Berbentuk Yayasan	54
4.2.	Estimasi Pengembalian Kredit	55
4.3.	Hambatan Pemberdayaan.....	59
4.4.	Pemberdayaan dan Kendala Laten.....	62
4.4.1.	Pemasaran Ikan.....	62
4.4.2.	Peningkatan Pendidikan Nelayan.....	64
BAB V	KESIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA		69



LIPI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Adaptasi dan Institusi Sosial Ekonomi	14
Tabel 2 : Pola Umum Bagi Hasil	19
Tabel 3 : Pemilikan Individu dan Ketimpangan Pendapatan	20
Tabel 4 : Pendapatan Bersih Nelayan Dengan Pola Pemilikan Kelompok (Tempo dulu)	22
Tabel 5 : Pemilikan Kelompok dan Pemerataan Pendapatan	24
Tabel 6 : Jenis Barang yang Digulirkan dan Nilai Kredit	42
Tabel 7 : Pendapatan Nelayan Srool/	49



LIPI



ABSTRAK

Model pemberdayaan nelayan miskin yang di ujicobakan dalam penelitian uji eksperimen di desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban merupakan model pemberdayaan yang dirumuskan berdasarkan tradisi masyarakat nelayan. Perumusan pemberdayaan seperti ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa model pemberdayaan yang sesuai dengan tradisi nelayan akan lebih efektif, murah dan mudah diterapkan.

Nelayan, khususnya yang tradisional, mempunyai perilaku yang khas dalam menjalankan usahanya, yakni perilaku yang mengutamakan "pemerataan resiko" usaha. Perilaku tersebut terbentuk sebagai hasil adaptasi terhadap usaha penangkapan ikan yang beresiko tinggi dan pola pendapatan yang tidak teratur. Perilaku adaptif tersebut, setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentuk institusi, dan merupakan bagian dari kebudayaan nelayan. Institusi-institusi yang dimaksud, yang merupakan aspek penting dalam pemberdayaan, adalah pola pemilikan kelompok atas sarana produksi dan sistem bagi hasil. Selama pola pendapatan nelayan tidak teratur, selama itu pula tampaknya perilaku mengutamakan pemerataan resiko tetap bertahan.

Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas antara pola pemilikan kelompok, sistem bagi hasil, dan pembagian pendapatan. Semakin dominan pola pemilikan kelompok atas sarana produksi dalam konteks tradisi bagi hasil yang berlaku pada suatu komunitas nelayan, semakin tinggi pula tingkat pemerataan pembagian pendapatan diantara nelayan, dan secara keseluruhan semakin baik pula perekonomian nelayan. Demikian sebaliknya, semakin dominan pola pemilikan individu atas sarana produksi dalam konteks tradisi bagi hasil yang ada, maka semakin timpang pembagian pendapatan diantara mereka.

Dalam komunitas nelayan yang pola pemilikan terhadap sarana produksi didominasi oleh pola pemilikan individu, akumulasi modal dan mobilitas sosial vertikal terjadi terutama pada kelompok pemilik sarana produksi. Sementara kelompok yang lain stagna dalam tataran hidup yang subsisten. Pola pemberdayaan nelayan yang dikembangkan adalah langkah-langkah praktis untuk mendorong meningkat dan meluasnya pola pemilikan kelompok atas sarana produksi di kalangan nelayan.



BAB I

PENDAHULUAN

LIPI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi sektor penangkapan ikan yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini secara kuantitatif telah meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan. Data statistik Indonesia (1995 & 1996) menunjukkan bahwa pada tahun 1980 produksi ikan Indonesia berjumlah 1.349.800 ton. Angka ini pada tahun 1990 meningkat menjadi 2.370.000 ton, dan meningkat lagi menjadi 3.370.930 ton pada tahun 1995.

Peningkatan produktivitas tersebut, berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI tahun 1997 dan 1998, belum secara nyata meningkatkan kesejahteraan sebagian besar nelayan. Dalam perekonomian nelayan, hasil tangkapan yang melimpah tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan nelayan. Banyak kendala yang mempengaruhinya. Sering kali hasil yang melimpah di suatu tempat tertentu menyebabkan harga ikan jatuh. Dalam hal ini penawaran lebih besar dari pada permintaan. Sebagai akibatnya pendapatan nelayan relatif konstan. Lebih dari itu, nelayan umumnya kurang menguasai pasar. Penjualan ikan umumnya dilakukan melalui pihak kedua sebagai perantara, seperti juragan darat (nelayan pemilik sarana produksi yang tidak ikut melaut) atau pedagang ikan yang sebelumnya telah mengikat nelayan dengan utang. Perantara ini senantiasa menentukan harga ikan yang lebih rendah dari harga pasar, bahkan penetapan harga tersebut cenderung jauh dari harga yang layak. Mekanisme penjualan ikan seperti ini menyebabkan pendapatan nelayan terpuruk terus.

Selain faktor-faktor diatas, tingkat perekonomian nelayan tersebut sering dikaitkan pula dengan pola hidup yang boros. Mereka berperilaku agak royal apabila mereka berhasil memperoleh tangkapan ikan yang cukup banyak, dan menjual apa saja yang mereka miliki, atau mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada saat-saat tidak memperoleh ikan atau sedang kekurangan.

Berkaitan dengan ini, salah satu fenomena sosial yang menonjol dikalangan nelayan adalah hubungan patron – klien berdasarkan hutang – piutang. Hubungan patron – klien berdasarkan

ikatan hutang ini sering dimanfaatkan oleh patron untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Penetapan harga ikan lebih rendah daripada harga pasar oleh juragan darat atau pedagang ikan sebagaimana yang dikemukakan didepan merupakan contoh dari pemanfaatan hubungan patron klien untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam usaha memperoleh keuntungan pribadi sebesar – besarnya, patron senantiasa memposisikan diri sebagai “pemberi modal” dalam segala urusan pada nelayan sebagai kliennya. Praktek – praktek seperti ini juga senantiasa memberatkan klien. Akibat lebih lanjut dari praktek-praktek tersebut adalah ketidak mampuan nelayan dalam pengadaan modal. Bisa dimengerti apabila sebagian besar nelayan tidak memiliki sarana produksi.

Oleh karena itu,, anggapan atau kesan umum yang terbentuk tetang nelayan kurang menguntungkan. Misalnya, anggapan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tertinggal dilihat dari aspek ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Mereka dianggap miskin, lemah, dan kurang mampu mengembangkan diri. Apabila anggapan tersebut digunakan sebagai titik tolak, maka masalah penting dimasa-masa mendatang berkenaan dengan masyarakat nelayan adalah masalah pengentasan kemiskinan nelayan.

1.2. Permasalahan

Dilihat dari perspektif yang berkembang selama ini, masalah kemiskinan nelayan umumnya dilihat dari dua sudut pandang, yakni pandangan struktural dan kultural. Pendukung pandangan pertama beranggapan bahwa karena strukturlah sebagian besar nelayan menjadi miskin. Sedangkan bagi pendukung pandangan kedua beranggapan bahwa budaya nelayanlah yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Selama ini, pandangan kultural terhadap kemiskinan nelayan tampaknya lebih kuat gaungnya dibandingkan yang pertama. Artinya, masalah kultural dianggap sebagai faktor dominan penyebab kemiskinan nelayan.

Apabila sudut pandang kultural tersebut digunakan sebagai dasar, maka secara hipotetis adalah benar semua masyarakat nelayan miskin. Nelayan, sebagai komunitas sosial yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan, mempunyai budaya yang sama, etika ekonomi yang sama, katakanlah budaya kemiskinan. Karena budayanya, masyarakat nelayan menjadi miskin.

Masalahnya adalah apakah betul semua nelayan miskin? Realitas yang ada dilapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Meskipun sebagian besar nelayan bisa dikatakan hidup pada tataran subsisten, terdapat sejumlah komunitas nelayan yang betul-betul telah berkembang dilihat dari tingkat perekonomiannya. Mereka hidup tidak lagi pada tataran subsisten, tetapi sudah pada tataran ekonomi komersial atau semi komersial. Beberapa contoh dapat di sebutkan disini adalah komunitas nelayan di daerah Bulu (Tuban) komunitas nelayan di Pasongsongan (Madura), di Gudang Lelang (Lampung), di Pajukukang (Maros). Secara teoritis, kantong-kantong komunitas seperti ini tentunya tidak terjadi. Mengapa sejumlah komunitas nelayan tertentu dapat mencapai tingkat perekonomian yang lebih tinggi?

Realitas lain yang relawan dikemukakan pula bahwa disetiap kantong-kantong masyarakat nelayan terdapat investor "asing" yang menanamkan modalnya untuk usaha penangkapan ikan. Mereka umumnya pemilik modal bukan nelayan yang mengembangkan usahanya disektor penangkapan ikan. Ini berarti bahwa usaha penangkapan ikan secara ekonomi menguntungkan. Mereka, bersama-sama dengan nelayan pemilik sarana produksi (juragan darat), umumnya sukses dalam mengembangkan usahanya, sebagai kelompok, mereka merupakan kelompok elit nelayan, dan secara ekonomi mereka merupakan kelompok nelayan kaya.

Ini berarti bahwa faktor penting sehingga mereka menjadi kaya bukanlah faktor kultural semata-mata, tetapi lebih ditentukan oleh faktor penguasaan atas sarana produksi. Ini tentunya lebih berdimensi struktural dari pada dimensi kultural.

Atas dasar pemikiran tersebut, Puslitbang ekonomi dan Pembangunan – LIPI tahun anggaran 1997 melakukan penelitian untuk menguji apakah kemiskinan nelayan itu merupakan kemiskinan kultural ataukah kemiskinan struktural, sekaligus merumuskan pendekatan yang bagaimana yang perlu dikembangkan untuk menangani masalah kemiskinan nelayan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang menarik. Bahwa struktur sosial ekonomi nelayan cenderung menguntungkan kelompok pemilik sarana produksi, dan mendorong terjadinya ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Akumulasi modal terjadi terutama pada kelompok pemilik sarana produksi. Kemiskinan nelayan dengan demikian lebih merupakan kemiskinan struktural daripada kemiskinan kultural.

Kesimpulan lain yang menarik, khususnya berkenaan dengan pemberdayaan nelayan, adalah bahwa pemilikan kelompok atas sarana produksi (capital Sharing) dalam konteks tradisi "bagi hasil" akan mampu mendorong terjadinya pemerataan dalam pembagian pendapatan dikalangan nelayan. Sebaliknya, pola pemikiran individu lebih mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan diantara mereka.

Dari kesimpulan ini tersusunlah sebuah tesis bahwa pemilikan kelompok atas sarana produksi dalam konteks tradisi “bagi hasil” akan mampu mendorong terjadinya pemerataan pendapatan dikalangan nelayan, dan lebih lanjut akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian nelayan secara keseluruhan.

Tesis tersebut pada tahun berikutnya (1998) diuji validitasnya melalui metode penelitian yang dilakukan di beberapa komunitas nelayan yang berbeda. Hasil akhir yang diperoleh memperkuat tesis tersebut. Artinya berdasarkan data-data atau hasil penelitian tahun kedua, konsep tersebut lebih teruji validitasnya.

Pada tahun anggaran 1999/2000, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI mempunyai beberapa program pemberdayaan. Kesempatan ini dimanfaatkan pula untuk mereduksi tesis diatas. Uji tesis sekali lagi dilakukan. Berbeda dengan penelitian uji tesis yang pertama, uji tesis yang kedua ini dilakukan dengan metode eksperimen, yang dilakukan di desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Jadi, permasalahan utama berkenaan dengan program pemberdayaan nelayan adalah seberapa jauh model atau pendekatan pemberdayaan tersebut valid atau dapat dibenarkan melalui penelitian dengan metode eksperimen.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian dan pemberdayaan ini adalah untuk menguji keabsahan model pemberdayaan nelayan yang efektif, mudah dan murah, yakni model pemberdayaan melalui pengembangan pola pemilikan kelompok. Adapun saranannya adalah untuk membantu nelayan dalam pengadaan sarana produksi. Karena itu, nelayan yang terlibat sebagai target group adalah nelayan – nelayan yang belum memiliki sarana produksi atau nelayan buruh (ABK). Sasaran lainnya adalah terjadinya pemerataan pendapatan dikalangan nelayan dan perbaikan ekonomi nelayan pada umumnya.

1.4 Metodologi

Sebagaimana yang telah disinggung di depan bahwa penelitian uji tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen (uji coba). Dalam hal ini, peneliti (PEP) akan menyediakan sarana produksi. Pengadaan sarana tersebut meliputi seperangkat alat penangkapan ikan lengkap, yang terdiri dari perahu nelayan, mesin penggerak, alat penangkapan ikan , dan kelengkapan lainnya. Seperangkat sarana

produksi tersebut kemudian diserahkan kepada kelompok nelayan yang dibentuk (target group) terlebih dahulu.

Kelompok nelayan penerima sarana produksi harus membayar kembali modal yang diterimanya. Pengembalian modal dilakukan berdasarkan tradisi yang berlaku dikalangan nelayan, yakni bagi hasil. Bagian yang diserahkan pada juragan pemilik sarana produksi sesuai dengan sistem bagi hasil yang berlaku diperhitungkan sebagai uang angsuran. Cara ini dilakukan berdasarkan pertimbangan budaya "tidak teratur" nelayan. Nelayan, karena budayanya yang spesifik, umumnya sulit mengangsur secara teratur hutang-hutang mereka, baik jumlah ataupun waktunya. Apabila telah terbayar lunas, sarana penangkapan ikan tersebut menjadi milik kelompok. Pengamatan dan analisa akan diarahkan pada kelompok sasaran. Berbagai permasalahan yang muncul akan difahaminya dalam konteks lingkungan sosial yang melingkupinya. Dalam konteks ini akan dianalisa secara mendalam keterkaitan antara pola pemilikan kelompok, pemerataan pendapatan, dan mobilitas sosial dari masyarakat nelayan.

Tolak ukur yang digunakan adalah pendapatan mereka. Pertama, dengan model pemberdayaan ini, apakah pendapatan mereka mengalami peningkatan? Kedua adalah apakah pemerataan pendapatan akan makin terjadi dikalangan mereka dengan sistem pemilikan kelompok atas sarana produksi tersebut? Masalah-masalah ini menjadi penting dalam analisa, dengan asumsi bahwa makin terjadi pemerataan pembagian pendapatan, maka makin besar skala nelayan yang kaya. Makin besar skala nelayan kaya dalam suatu masyarakat, semakin kuat mobilitas vertikal keatas, dan secara keseluruhan perekonomian nelayan tersebut akan menjadi lebih baik.

Dengan demikian metode yang dikembangkan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Kesimpulan-kesimpulan penelitian dibangun berdasarkan pola pikir yang bersifat induktif, bukan berdasarkan hasil-hasil pengukuran, akan tetapi atas dasar pemahaman terhadap realitas yang ada. Dengan sendirinya metode analisa yang dikembangkan adalah metode analisa pemahaman. Singkatnya, analisa yang dikembangkan adalah analisa kualitatif berdasarkan metode verstehen.





BAB II

PEMILIKAN KELOMPOK DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

LIPI

BAB II

PEMILIKAN KELOMPOK DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pendahuluan, tujuan dari penelitian pemberdayaan ini adalah penelitian uji tesis tentang pola pemilikan kelompok sebagai model pemberdayaan yang efektif, mudah, dan murah, dengan metode eksperimen. Melalui pengujian ini, diharapkan keterkaitan sebab-akibat antara pola pemilikan kelompok, pemerataan, dan mobilitas sosial nelayan akan semakin jelas dan teruji.

Sedangkan pemberdayaan disini diartikan sebagai suatu usaha yang memungkinkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, yakni masyarakat nelayan, mampu mengembangkan diri dalam berusaha, sehingga secara bertahap mereka menjadi kelompok masyarakat yang sukses secara sosial ataupun ekonomi.

2.1. Kemiskinan dan Ekonomi Nelayan

Masyarakat nelayan, khususnya yang tradisional, sering dipandang identik dengan kemiskinan (Mubyarto, 1994; Sawit, 1988). Selain miskin, mereka juga dianggap lemah, bodoh, tidak efisien, dan kurang mampu merencanakan masa depannya sendiri. Pandangan seperti ini tentu saja mengandung unsur bias, dan belum tentu benar adanya. Akan tetapi pandangan tersebut cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan masyarakat nelayan (Kartasasmita, 1996 :146-149). Pengaruh tersebut dapat dilihat misalnya pada pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah selama ini, yang menempatkan nelayan bukan sebagai subyek, pelaksana pembangunan, akan tetapi sebagai obyek pembangunan.

Melihat potensi perikanan yang ada, masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir seharusnya merupakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Potensi sumber daya laut, menurut data terakhir, masih melimpah, mencapai 6,18 juta ton per tahun (Umbari, 1999). Namun kenyataan yang ada sebagian besar dari mereka masih jauh dari sejahtera. Bahkan sering dikatakan bahwa mereka merupakan

kelompok masyarakat yang paling tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Masalahnya adalah mengapa mereka miskin, setidak-tidaknya dianggap miskin, sementara sumber daya laut melimpah? Melihat besarnya sumber daya laut yang tersedia, sulit dimengerti bahwa kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat nelayan merupakan kemiskinan alamiah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sinaga dan White (1980 : 139 – 158), yakni kemiskinan yang terjadi akibat sumber daya alam yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan primer penduduk.

Masyhuri (1999 : 15 – 34) menyimpulkan bahwa kemiskinan nelayan lebih disebabkan oleh struktur ekonomi nelayan, dan bukannya sumber daya yang terbatas. Kemiskinan struktural dalam tulisan ini dipahami sebagai suatu kondisi yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat, mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Soemardjan, 1980 : 39; Soedjatmoko, 1980). Mereka ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau tanah yang dimilikinya terlalu sempit sehingga tidak cukup untuk memberi makan kepada diri dan keluarganya. Termasuk kelompok miskin adalah kelompok nelayan yang tidak memiliki sarana produksi, kaum buruh yang tidak terpelajar dan terlatih, dan sebagainya.

Pemahaman tentang kemiskinan struktural sebenarnya telah disadari oleh para ilmuwan sosial sejak lama. Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) yang di selenggarakan di Malang pada akhir tahun 1997 misalnya telah mengangkat kemiskinan struktural menjadi tema utama kongres (Alfian, 1980) Dari berbagai permasalahan yang di seminarkan, tampak bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara pemerataan pemanfaatan sumber ekonomi yang tersedia dan kemiskinan ekonomi. Sementara ketimpangan itu sendiri lebih banyak ditentukan oleh struktur sosial masyarakat.

Permasalahan kemiskinan struktural dengan demikian berkaitan erat dengan pemerataan akses kepada sumber daya yang tersedia. Mereka yang kebetulan menguasai akses tersebut, karena kedudukan atau perannya dalam struktur masyarakat, dengan mudah memanfaatkan sumber-sumber modal, pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Melalui cara-cara demikian, mereka menjadi kaya. Sementara kelompok lainnya miskin, dan tetap miskin, walaupun sebenarnya pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut akan dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari keadaan miskin apabila dibagi secara merata. Masalah pemerataan dengan

demikian merupakan konsep penting dalam memahami kemiskinan nelayan. Sebelum mendiskusikan lebih lanjut masalah kemiskinan nelayan, akan dipaparkan terlebih dahulu, realitas yang terjadi di seputar usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Laut bagi nelayan bukannya instrumen atau obyek produksi, tetapi sebagai subjek produksi. Artinya, keterlibatan nelayan dalam proses produksi tidak banyak, meskipun keterampilan penguasaan teknis, pengetahuan terhadap iklim, perilaku atau habitat ikan, musim ikan dan sebagainya sangatlah penting. Apabila hasil tangkapan berkurang, paling jauh para nelayan mencari daerah tangkapan baru yang diperkirakan masih banyak ikannya. Tidak aneh, apabila suatu saat tertentu nelayan dari suatu tempat berbordong-bondong ketempat lain untuk melakukan penangkapan ikan.

Usaha penangkapan ikan bagi nelayan bagaikan seni, seni berburu penuh spekulasi, dan karenanya pendapatan nelayan tidak tentu. Suatu saat, nelayan berpendapatan besar dan saat lain tidak berpendapatan sama sekali. Mereka tidak pernah mempunyai gambaran tentang pendapatan yang akan mereka peroleh. Semuanya serba meraba-raba dan tidak menentu (Masyhuri 1998 : 3 –4).

Bisa dikatakan, nelayan bekerja lebih keras dibandingkan dengan petani, atau setidak-tidaknya mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja dibandingkan para petani. White dalam studinya tentang pekerjaan di pedesaan Jawa menghitung jumlah hari dan jam petani bekerja sepanjang musim penghujan selama 180 hari. Tercatat hanya sebagian kecil dari waktu bekerja, yakni hanya 22 persen dari waktu kerja riil atau hanya 10 persen dari potensi waktu kerja, digunakan untuk bekerja di sawah (White, 1976: 272-273). Selebihnya mereka menganggur atau bekerja serabutan. Rendahnya pemanfaatan waktu untuk bekerja di sawah tersebut antara lain disebabkan oleh melimpahnya tenaga kerja petani dan terbatasnya pekerjaan yang tersedia (Singarimbun dan D.H. Penny, 1976 : 36)

Nelayan bekerja sepanjang jam kerja pada hari kerja. Dalam satu tahun, rata-rata nelayan melaut sebanyak 200 kali, yakni seluruh hari yang memungkinkan mereka dapat melaut. Pada masa-masa terang bulan atau pada saat-saat cuaca buruk mereka tidak melaut. Selama itu, mereka memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Apabila mereka tidak melaut, mereka umumnya menggunakan waktunya untuk perbaikan peralatan yang rusak, seperti jaring, mesin perahu. Perawatan terhadap perahunya sendiri menyita waktu yang cukup banyak.

Setidak-tidaknya ada tiga pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan. Pertama adalah pola penangkapan ikan lebih dari satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu atau lebih dari satu minggu. Pola penangkapan seperti ini berkenaan dengan penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dekatnya daerah tangkapan (*fishing ground*) dan besar kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut. Kedua, adalah pola penangkapan ikan satu hari (*one day fishing*). Biasanya mereka berangkat melaut sekitar jam 14.00 dan mendarat kembali sekitar jam 09.00 pagi hari berikutnya. Pola penangkapan ikan sehari seperti ini termasuk penangkapan ikan lepas pantai. Pola penangkapan ikan yang ketiga adalah pola penangkapan ikan tengah hari. Pola penangkapan ikan seperti ini adalah penangkapan ikan dekat pantai. Umumnya mereka berangkat sekitar jam 3 dini hari, dan kembali mendarat sekitar jam 09.00 pagi.

Meskipun penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu beberapa hari mempunyai kemungkinan memperoleh pendapatan yang memadai, namun tidak ada jaminan bahwa penangkapan ikan yang dilakukan selama beberapa hari memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan sehari. Pendapatan mereka benar-benar sulit diduga. Sebuah kasus bagaimana tidak menentunya pendapatan nelayan barangkali menarik dikemukakan disini.

Kasus tersebut adalah sebuah kasus yang ditemui pada waktu penelitian lapangan di desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pada suatu siang, saya berbincang-bincang dengan dua orang juragan (nakhoda) yang pada saat itu sedang melakukan persiapan untuk melaut. Pembicaraan dengan mereka berlangsung cukup lama, dan sekitar jam 14.00 siang saat mereka akan berangkat menangkap ikan, saya mohon diri.

Pagi-pagi hari berikutnya, sekitar jam 8.30, saya menunggu kedatangan mereka, di tempat pertemuan sebelumnya. Kebetulan salah satu dari dua juragan yang saya temui hari sebelumnya mendarat. Tampak dari kejauhan mereka bersemangat, dan rupanya mereka berhasil memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak. Setelah menunggu sampai pembongkaran ikan selesai, yang memakan waktu kurang lebih dua jam, baru diketahui berapa hasil tangkapan malam itu. Dengan jumlah tangkapan sebanyak tiga palka penuh dengan ikan tongkol, ditambah kurang lebih 10 keranjang ikan tengiri dan ikan kembung, mereka memperoleh pendapatan malam itu seluruhnya kurang lebih Rp. 45 juta. Jumlah ini memang luar biasa, karena dihasilkan oleh perahu yang berukuran kurang dari 10 GT dengan jaring mini purse seine. Yang seperti ini oleh nelayan setempat

disebut “sangon baraf” (rizki untuk bekal musim barat). Pada saat saya di lapangan musim memang mulai berganti, dari musim timur ke musim barat. Pada musim barat nelayan biasanya sering tidak melaut akibat cuaca buruk.

Pada waktu menunggu pembongkaran ikan, saya tahu-tahu didekati oleh seseorang. Ternyata ia adalah juragan yang kemarin saya ajak berbincang-bincang. Dia mengaku bahwa hari itu ia rugi sebesar Rp. 150.000,- yakni pengeluaran untuk perbekalan penangkapan ikan. Kerugian ini diderita karena malam itu mereka tidak berhasil menangkap ikan sama sekali. Juragan tersebut termasuk juragan yang baik. Dia bersedia menanggung perbekalan melaut. Umumnya tidak demikian. Apabila pada hari itu gagal memperoleh ikan, pengeluaran untuk perbekalan melaut hari itu dibebankan pada hasil penangkapan ikan hari berikutnya.

Ilustrasi di atas adalah kasus yang eksterim. Namun dari ilustrasi tersebut tergambar jelas betapa labilnya dan tidak tetapnya pendapatan nelayan dari hasil penangkapan ikan di laut. Fenomena seperti ini tidak hanya pada saat-saat sekarang ini tetapi hal itu sudah terjadi sejak awal abad ke-19, pendapatan nelayan, khususnya nelayan pantai utara Jawa dan Madura, telah menunjukkan pola yang tidak tetap (Masyhuri, 1996).

Pola pendapatan yang tidak tetap dari usaha penangkapan ikan mempunyai pengaruh yang sangat besar baik pada organisasi produksi penangkapan ikan ataupun perekonomian nelayan. Berikut ini adalah gambaran dari perilaku ekonomi masyarakat nelayan. Sementara pengaruh pola pendapatan yang tidak tetap terhadap organisasi produksi akan dibahas dalam bagian-bagian terpisah berikutnya.

Banyak tuduhan yang dialamatkan kepada nelayan, bahwa mereka hidup boros, tidak hemat, dan serba menghambur-hamburkan uang untuk hura-hura, seperti minum, berjudi, dan sebagainya. Tuduhan tersebut berangkali ada benarnya akan tetapi tidak semuanya tepat. Apakah betul bahwa mereka hidup boros dan serba menghamburkan-hamburkan uang ? Bukanlah tuduhan tersebut merupakan kesan yang tercipta akibat pola pendapatan yang tidak teratur ?

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa pola pendapatan sektor penangkapan ikan tidak teratur. Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan hal ini adalah apa yang diperbuat oleh nelayan pada saat-saat mereka berpenghasilan besar, atau sebaliknya ? Apakah mereka mempunyai kebiasaan menabung, sehingga mereka

dapat memanfaatkan tabungannya pada saat-saat tidak memperoleh tangkapan ?

Adalah salah apabila diasumsikan bahwa nelayan tidak memiliki tradisi menabung. Sebagaimana komunitas lainnya, nelayan juga memiliki tradisi menabung yang cukup kuat. Hanya saja sistem menabung yang hidup dilingkungan nelayan sedikit berbeda. Menabung dalam bentuk uang di Bank cukup populer pula di kalangan mereka, khususnya nelayan-nelayan yang secara ekonomi mengalami kesuksesan dalam berusaha. Akan tetapi lebih dominan dari itu khususnya untuk nelayan yang kurang sukses, adalah menabung dalam bentuk barang, khususnya barang perhiasan. Disini perbedaan yang cukup nyata dengan tradisi menabung masyarakat petani. Berbeda dengan nelayan, barang-barang tabungan petani lebih bersifat produktif, seperti ayam, kambing, sapi, atau sawah.

Pada saat-saat tangkapan ikan baik, dan pendapatan nelayan memadai, mereka membeli peralatan rumah tangga atau apa saja yang mereka impikan, seperti TV, atau alat elektronik lainnya. Mereka juga tidak lupa menabung dengan membeli emas. Sebaliknya, apabila dalam waktu tertentu, lebih lagi bila dalam waktu yang cukup lama, tidak memperoleh penghasilan yang memadai, mereka dengan mudah dapat menjual semua barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun begitu, cara ini dilakukan bila tidak ada lagi alternatif lain. Dengan demikian sulit disimpulkan bahwa yang demikian ini disebut sebagai pola hidup yang boros.

Dalam keadaan sulit, ada beberapa cara yang ditempuh mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Alternatif pertama adalah mengusahakan menutup kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan "lawuhan" setiap kali malaut. "Lawuhan" adalah hak nelayan ABK untuk mengambil ikan secukupnya setiap kali melaut untuk keperluan auk-pauk. Banyak sedikitnya "lawuhan" tergantung banyak sedikitnya hasil tangkapan. Apabila hasil tangkapan banyak, jumlah lawuhannya pun banyak juga. Apabila hasil tangkapan sedikit, biasanya hasil tangkapan hari itu habis untuk "lawuhan". Ikan lawuhan ini biasanya dijual, dan hasilnya untuk keperluan makan hari itu.

Apabila hasil penjualan lawuhan tidak mencukupi, maka alternatif kedua adalah menjual barang-barang yang mereka miliki. Tidak saja emas atau peralatan elektronik, tetapi juga piring-piring yang cukup berhargapun dijualnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Istilah "*sangon barat*" di atas sebenarnya mengandung pengertian ini. Pada musim barat, nelayan biasanya sulit melaut, akibat cuaca buruk. Pendapatan yang cukup besar pada awal-awal musim barat merupakan bekal selama musim barat.

Apabila sudah demikian, dan musim ikan belum kunjung datang pula, mereka menempuh alternatif ketiga, yakni meminjam uang kepada juragan darat, tempat mereka bekerja. Fenomena seperti ini merupakan latar belakang suburnya hubungan patron klien dikalangan masyarakat nelayan antara juragan, khususnya juragan darat dan nelayan.

Hubungan patron-klien antara juragan (darat) dan nelayan yang terbentuk sering bersifat eksploratif, akan tetapi tidak jarang juga hubungan patron klien-klien tersebut bersifat simbiosis. Kapan hubungan patron-klien tersebut bersifat eksploratif atau simbiosis akan diungkapkan sekaligus dalam ulasan pengaruh pola pendapatan yang tidak teratur terhadap organisasi produksi usaha penangkapan ikan.

2.2. Pemilikan Individual dan Ketimpangan Pendapatan

Selain terhadap perilaku ekonomi nelayan, pola pendapatan yang tidak teratur dan penuh spekulasi berpengaruh pula pada organisasi produksi dari usaha penangkapan ikan. Tampaknya, terjadi suatu proses adaptasi dari nelayan terhadap pekerjaan mereka. Adaptasi tersebut antara lain terwujud pada institusi-institusi khusus dalam organisasi produksi masyarakat nelayan (Nadjib: 1998: 61-17)

Menurut Bennet, yang dikutip oleh Nadjib (1998), adaptasi merupakan tingkah laku penyesuaian yang menunjuk pada tindakan, sebagai langkah strategis dalam upaya memaksimalkan kesempatan hidup. Adaptasi terhadap lingkungan tersebut, juga terhadap sektor penangkapan ikan bagi nelayan, merupakan tingkah laku yang diulang-ulang, dan setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentuk institusi, serta merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yakni kebudayaan. Pada masyarakat nelayan, adaptasi yang terjadi adalah adaptasi terhadap ekosistem lingkungan fisik laut dan lingkungan sosial disekitarnya.

Adaptasi terhadap sektor usaha yang penuh spekulatif, pendapatan yang tidak menentu, dan penuh resiko seperti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional tentu saja berbeda dengan adaptasi yang terjadi terhadap sektor usaha dengan pola pendapatan yang lebih teratur, seperti sektor pertanian misalnya. Berbeda dengan usaha penangkapan ikan, usaha pertanian memberi penghasilan yang lebih pasti. Meskipun usaha pertanian dapat gagal, misalnya karena hama penyakit atau kekeringan untuk sawah tada hujan, pola pendapatan dari sektor ini lebih teratur. Tanah bagi petani adalah instrumen atau obyek produksi. Petani terlibat langsung dalam proses produksi. Petani terlibat langsung dalam mempersiapkan lahan,

pembenihan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Mereka mempunyai gambaran yang agak pasti seberapa banyak padi yang bakal diperolehnya. Mereka juga mengetahui kapan kira-kira panen berikutnya akan tiba.

Disamping itu, petani juga mempunyai gambaran berapa banyak pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup sampai panen berikutnya. Gambaran atau pengetahuan berapa banyak pendapatan dan berapa besar pengeluaran merupakan alasan kuat para petani memperhitungkan secara teliti dalam membelanjakan pendapatannya. Mereka cenderung beradaptasi pada hal-hal yang telah mapan dan kurang berani berspekulasi. Adaptasi yang berkembang, dan yang kemudian mentradisi sebagai moral ekonomi petani adalah "mengutamakan selamat" yang oleh Scott (1976) dikatakan sebagai etika subsistensi petani.

Apabila adaptasi petani terhadap usaha pertanian melahirkan apa yang disebut sebagai etika subsistensi, adaptasi nelayan terhadap usaha penangkapan ikan penuh dengan spekulasi dan ketidak pastian melahirkan perilaku khusus, yakni katakanlah etika pemerataan resiko. Perilaku ini, setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentuk institusi. Diataranya yang relevan dengan pembahasan ini adalah institusi pemilikan sarana produksi dan institusi bagi hasil. Tampaknya selama pola pendapatan usaha penangkapan ikan oleh nelayan tradisional tetap tidak teratur, selama itu pula institusi-institusi tersebut akan hidup terus dikalangan nelayan. Tabel 1 berikut menunjukkan perbedaan yang nyata adaptasi yang dilakukan oleh nelayan dan petani terhadap sektor usaha yang ditekuninya.

Tabel 1
ADAPTASI DAN INSTITUSI SOSIAL EKONOMI

Keterangan	Nelayan	Petani
Pendapatan Moral	Labil/tidak tentu Mengutamakan Pemerataan Resiko	Tetap/teratur Mengutamakan keselamatan
Perilaku Institusi	Spekulasi <ul style="list-style-type: none">- Pola pemilikan kelompok- Sistem bagi hasil- dan lain-lain	Mengutamakan kepastian <ul style="list-style-type: none">- Gontong royong- Lumbung desa- Arisan- dan lain-lain

Sebagaimana yang telah disinggung di depan, usaha penangkapan ikan mempunyai resiko tinggi. Di samping kemungkinan tidak memperoleh tangkapan, sehingga nelayan dapat rugi, resiko kehilangan perahu atau jaring pada waktu penangkapan ikan adalah sangat mungkin. Untuk memperkecil kerugian yang mungkin dideritanya, nelayan mengembangkan pola pemilikan kelompok atas sarana produksi. Satu unit sarana penangkapan lengkap dimiliki oleh lebih dari satu orang, bahkan sampai 15 orang. Tidak diketahui secara pasti kapan pola pemilikan kelompok ini mulai muncul. Setidaknya, sejak awal abad ke-19 yang lalu pola pemilikan kelompok tersebut telah ada. Bahkan bisa dikatakan, pola pemilikan secara berkelompok ini sangat dominan sampai menjelang akhir abad ke-19. Sejak pergantian abad ke-19 dan abad ke- 20, terjadi pergeseran, pola pemilikan individu makin bertambah (Masyhuri, 1996). Pergeseran ini terjadi akibat putusnya hubungan simbiosis antara nelayan dan penyedia modal (*pachter*). Bagaimana persisnya hal ini terjadi masih akan dibahas lebih lanjut kemudian. Dewasa ini, justru pola pemilikan individu lebih dominan dibandingkan dengan pola pemilikan kelompok.

Pola pemilikan kelompok dan pola pemilikan individu terhadap sarana penangkapan ikan mempunyai pengaruh besar pada pendapatan nelayan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pola pemilikan individu terhadap sarana produksi tersebut mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan di antara nelayan. Sementara pemilikan kelompok lebih mendorong terjadinya pemerataan pendapatan di antara mereka. Berikut adalah uraian tentang pola pemilikan individu dan ketimpangan pendapatan nelayan. Sementara pola pemilikan kelompok dan pemerataan pendapatan nelayan akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

Pada prinsipnya baik ketimpangan pembagian pendapatan ataupun pemerataan pendapatan berpangkal pada sistem bagi hasil yang mentradisi di kalangan nelayan. Sebagaimana pola pemilikan kelompok terhadap sarana penangkapan ikan, tidak diketahui kapan sistem bagi hasil ini tercipta di kalangan nelayan. Namun, setidak-tidaknya sejak awal abad ke-19, sistem bagi hasil tersebut sudah ada. Arsip-arsip Pemerintah Hindia Belanda awal abad itu telah menyinggung-nyinggung tentang sistem bagi hasil tersebut. Pada saat sekarang, informasi tentang sistem tersebut dengan mudah dapat diperoleh dimana saja di pusat-pusat pemukiman nelayan di Indonesia.

Keberadaan sistem bagi hasil tersebut bertahan terus sampai saat ini.. Sebagaimana yang telah disinggung di depan, berkaitan erat dengan pola pendapatan nelayan yang tidak teratur. Yang menarik dari komunitas-komunitas nelayan yang ada, baik komunitas nelayan

Palang (Tuban) dan di tempat-tempat lainnya adalah tingkat perekonomian mereka. Apabila pola pemilikan atas sarana penangkapan ikan dalam komunitas tertentu di dominasi oleh pola pemilikan individu, garis pemisah yang jelas tercipta antara sekelompok kecil yang kaya dan sekelompok besar dari anggota komunitas nelayan yang miskin. Sebaliknya, bila pola pemilikan kelompok atas sarana produksi lebih dominan, jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin kurang tampak, atau samar-samar. Secara keseluruhan, tingkat perekonomian suatu komunitas nelayan dengan dominasi pola pemilikan kelompok atas sarana produksi lebih baik dibandingkan dengan komunitas nelayan dengan komunitas pola pemilikan individu. Singkatnya, apakah ada keterkaitan antara pola pemilikan sarana produksi, sistem bagi hasil, dan perekonomian nelayan?

Beberapa pembahasan tentang sistem bagi hasil telah dilakukan (a.l. Nadjib, 1993 dan 1998, Imron, 1998, Astuty, 1999) Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, juga di daerah Palang (Tuban) tampak bahwa nelayan pada umumnya, dan juga juragan, lebih suka memilih sistem bagi hasil sebagai cara untuk menentukan imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan dibandingkan dengan sistem upah, upah harian misalnya.

“Kalau di upah, hasilnya itu-itu saja pak. Kalau bagi hasil, kadang-kadang memang tidak mendapat hasil apa-apa, tetapi kalau pas hasil tangkapan banyak, bagian yang diterima banyak. Dari situ kita dapat bayar utang” (Masyhuri, 1999).

Kutipan diatas adalah hasil wawancara terhadap nelayan di Karang Agung (Palang, Tuban) yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Dari kutipan tersebut tampak adanya kecenderungan yang kuat bahwa nelayan lebih memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja. Selain itu, tampak bahwa sikap yang spekulatif sangat kuat mengakar dalam kehidupan nelayan, dan adanya hubungan kausalitas antara pola pendapatan yang tidak teratur dari sektor penangkapan ikan dan sistem bagi hasil yang dipertahankan oleh nelayan.

Adapun alasan mengapa para juragan (pemilik sarana produksi) lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian yang besar. Penerapan upah bagi juragan berarti pengeluaran yang pasti. Padahal penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama. Sistem bagi hasil bagi juragan berarti pemerataan resiko. Resiko kegagalan

dalam penangkapan ikan dengan demikian ditanggung secara bersama-sama antara juragan dan anak buah (buruh) kapal.

Kasus seorang juragan yang merugi sebesar Rp. 150.000,- semalam yang dikemukakan dibagian depan relevan untuk dikenalkan disini. Juragan tersebut adalah pemilik perahu mini purse seine, yakni sebuah perahu nelayan yang dioperasikan oleh 15 orang nelayan. Kerugian sebesar itu adalah pengeluaran operasional selama satu malam, dan kebetulan malam itu mereka gagal memperoleh ikan. Dalam kasus ini, pengeluaran operasional (perbekalan) tersebut ditanggung oleh juragan sendiri. Apabila juragan tersebut masih dibebani dengan upah harian untuk semua nelayan yang terlibat, tentu saja kerugian yang ditanggung oleh juragan akan menjadi lebih besar.

Buruh-buruh nelayan yang tergabung pada organisasi penangkapan ikan tersebut beruntung karena juragan bersedia menanggung pengeluaran untuk operasional. Pada waktu ditanyakan kepadanya mengapa ia mau menanggung pengeluaran untuk perbekalan, karena yang demikian itu tidak lazim pada nelayan, ia menerangkan bahwa anak buah kapal (ABK) tersebut telah bekerja bertahun-tahun dengannya. Pada waktu-waktu sebelumnya mereka telah banyak memberi keuntungan, dan mereka juga telah dianggap sebagai keluarga sendiri.

Pada umumnya, biaya operasional dibebankan pada uang tengah, yakni bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam sistem bagi hasil yang diambil sebelum ikan hasil tangkapan dibagi diantara mereka. Apabila gagal tidak memperoleh hasil tangkapan, biaya untuk operasional tersebut dibebankan pada hasil tangkapan berikutnya. Mekanisme seperti ini merupakan salah satu sebab mengapa buruh nelayan (ABK) umumnya terikat hutang kepada juragan.

Terdapat variasi yang cukup beragam tentang sistem bagi hasil antara satu daerah dan daerah lainnya, antara satu kelompok dan kelompok lainnya, dan antara satu alat tangkap dan alat tangkap yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh tradisi masing-masing daerah. Ciri yang menonjol dari perairan tropis adalah spesies ikannya. Jenis ikan pada perairan tropis sangat banyak, akan tetapi tidak diketemukan jenis ikan tertentu yang secara individual membentuk kelompok yang besar. Beberapa teknologi dikembangkan untuk menangkap berbagai spesies ikan tersebut secara khusus, dan jenis alat tangkap dari ikan yang dihasilkannya sangat mempengaruhi sistem bagi hasil yang berlaku. Selain itu, corak hubungan yang terjalin antara juragan dan buruh nelayan juga ikut mempengaruhinya.

Mekipun demikian, secara umum sistem bagi hasil di kalangan nelayan adalah sebagai berikut. Hasil dari perahu nelayan yang dioperasikan tidak lebih dari 6 orang dibagi rata, masing-masing mendapat 1 bagian, termasuk perahu dan alat tangkapnya. Pemilik sarana produksi biasanya menerima dua bagian, 1 bagian dari keterlibatannya dalam penangkapan, dan 1 bagian untuk peralatan. Nelayan lainnya masing-masing memperoleh satu bagian.

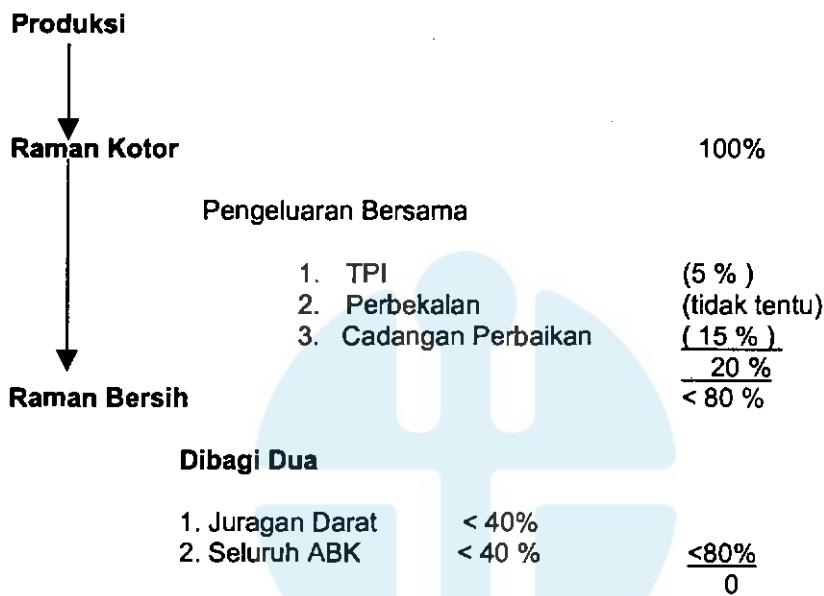
Untuk perahu nelayan yang dioperasikan oleh 8 orang nelayan atau lebih, pembagian hasil adalah sebagai berikut. Hasil kotor (raman) dikurangi uang tengah, yang terdiri dari biaya operasional, 5 persen untuk TPI, dan sekitar 15 persen dari hasil tangkapan untuk dana perbaikan peralatan. Uang tengah ini adalah hak juragan (pemilik sarana produksi), diterima dan dimilikinya.

Sisanya, yakni hasil bersih, dibagi dua, 50 persen untuk juragan dan 50 persen untuk anak buah kapal (ABK). Semua anak buah kapal mendapat 1 bagian, kecuali mereka yang mempunyai peran ganda, atau peran khusus tertentu. Nahkoda (juragan laut) misalnya mendapat 2 bagian, juru mesin mendapat 1,5 bagian. Dengan demikian seorang juragan (pemilik sarana produksi) memperoleh 65 persen lebih dari hasil tangkapan. Tabel berikut merupakan ilustrasi dari sistem bagi hasil yang dimaksud.

Selain bagian yang diterimanya berdasarkan sistem bagi hasil yang berlaku, seorang juragan umumnya memperoleh penghasilan ekstra, yakni selisih harga ikan yang ia tetapkan untuk nelayan anak buah kapal dan harga ikan hasil penjualan kepada pedagang ikan. Penjualan ikan umumnya dikuasai oleh istri juragan, dan dalam hal ini ia berfungsi sebagai perantara antara nelayan dan pedagang ikan.

Kasus yang ditemukan pada waktu penelitian lapangan tahun lalu di Karang Agung merupakan kasus yang menarik. Sebagaimana yang disebutkan di depan, sebuah perahu nelayan yang dioperasikan oleh 15 orang nelayan memperoleh ikan banyak sekali, yang menurut perkiraan kasar mencapai Rp. 45 juta. Pada waktu itu harga ikan tongkol di pasaran lokal sekitar Rp. 8.500,-/kg. Harga penjualan yang telah disepakati oleh istri juragan dengan pedagang ikan sebesar Rp. 7.500,- per kilogramnya.

Tabel 2
POLA UMUM BAGI HASIL



Sumber : Nadjib, 1993

Terhadap nelayan, istri juragan tersebut menetapkan harga sebesar Rp. 5.500,- per kilogramnya. Jumlah ikan yang didaratkan mencapai 6 ton lebih. Dengan sendirinya, selisih harga yang diterima oleh juragan dalam kasus ini mencapai sekitar Rp. 12 juta. Uang sebanyak ini sebenarnya merupakan bagian dari hasil kotor yang diperoleh oleh nelayan.

Praktek-praktek seperti ini, ditambahkan dengan sistem bagi hasil yang berlaku, jelas lebih menguntungkan kelompok juragan. Dari kasus tersebut bisa dihitung berapa besar bagian yang diperoleh juragan darat, yang mencapai hampir Rp. 30 juta. Sementara nelayan ABK masing-masing menerima RP. 930.000,- yakni 1 bagian dari 50 persen hasil bersih yang merupakan hak nelayan ABK seluruhnya. Nelayan ABK dalam hal ini tidak dapat berbuat apa-apa. Perahu tersebut sepenuhnya milik juragan dan dalam hal ini nelayan ABK tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar sama sekali (lihat tabel 3).

Tabel 3

PEMILIKAN INDIVIDU DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Mini Purse Seine/ABK = 15 orang

Produksi

Raman Kotor

- Hasil penjualan	Rp. 45.000.000,-
- Harga yang ditetapkan untuk nelayan	Rp. 33.000.000,-
- Selisih	Rp. 12.000.000, (hak juragan)

Pengeluaran bersama

1. TPI 5% dari harga nelayan	Rp. 1.650.000,-
2. Perbekalan	Rp. 150.000,-
3. Cadangan perbaikan 10	<u>Rp. 3.300.000</u> (hak juragan) Rp 5.100.000

Raman Bersih

Rp.27.900.000,-

Dibagi dua

1. Juragan 50 % dari Rp. 27.900.000 =Rp.13.950.000,-
2. Buruh ABK 50% dari Rp. 27.900.00 =Rp.13.950.000,-

Juragan menerima = Rp. 39.900.000,-
ABK menerima Rp.13.950.000:15 = Rp. 930.000,-

Sampai disini jelas bahwa pola pemilikan individu dalam tradisi sistem bagi hasil yang berlaku mendorong terjadinya akumulasi pendapatan kepada kelompok pemilik alat produksi. Akibatnya pemerataan pendapatan tidak terjadi pada komunitas nelayan yang pola pemilikan sarana produksi didominasi oleh pola pemilikan individu.

2.3. Pemilikan Kelompok dan Pemerataan Pendapatan

Sebagaimana Sistem bagi hasil, pola pemilikan kelompok di kalangan nelayan merupakan pola hasil adaptasi nelayan terhadap pekerjaan yang penuh resiko yang mereka lakukan. Sebagaimana

disinggung didepan, pemilikan kelompok pada dasarnya adalah pola yang tercipta akibat adanya usaha pemerataan resiko. Dengan pola pemilikan kelompok, kerugian akibat perahu hilang, tenggelam, pecah, dan sebagainya adalah tanggungan bersama. Tidak mengherankan bila pola pemilikan kelompok ini sudah ada sejak lama.

Seperti juga sistem bagi hasil, tidak diketahui secara pasti kapan pola pemilikan kelompok tersebut mulai ada. Yang jelas, pola pemilikan kelompok terhadap sarana produksi penangkapan ikan sangat dominan sejak awal abad ke- 19 sampai tahun-tahun 1880-an, khususnya untuk nelayan di pantai Utara Jawa dan Madura. Dominasi pola pemilikan kelompok ini dimungkinkan akibat adanya hubungan simbiosis antara nelayan dan para *pachter* di sektor perikanan.

Pachter adalah orang-orang yang memegang hak sewa sektor perikanan di daerah-daerah tertentu. Dengan memberikan sejumlah uang sewa kepada Pemerintah, mereka mempunyai hak menarik pajak dari nelayan, memperoleh hak melakukan eksplorasi penangkapan ikan, dan hak membeli garam dengan harga yang murah dari Pemerintah untuk pengawetan ikan. Mereka menyediakan modal untuk nelayan, dalam bentuk sarana penangkapan lengkap, dan diserahkan kepada nelayan secara kelompok. Sebaliknya, nelayan harus membeli sarana tersebut secara angsuran. Nelayan diharuskan menyerahkan sebagian dari hasil tangkapan sampai perahu tersebut terbayar lunas. Nelayan diharuskan pula menjual ikan selebihnya kepada *pachter* dengan harga yang telah ditetapkan (Masyhuri: 1996) Biasanya nelayan dapat mengangsur lunas perahu dan sarana penangkapan ikan yang diterimanya dalam waktu kurang lebih tiga tahun. Setelah itu sarana penangkapan tersebut sepenuhnya menjadi milik nelayan secara berkelompok.

Pendapatan nelayan pada masa-masa itu lebih tinggi, bila dibandingkan misalnya dengan pendapatan petani. Tingginya pendapatan nelayan ini merupakan akibat dari keberhasilan sistem ekonomi sewa waktu itu. Para *pachter* kapitalis, berhasil membangun struktur ekonomi yang saling mendukung. Mereka umumnya pedagang-pedagang Cina yang kaya, mempunyai industri pengawetan ikan, usaha angkutan, menguasai hak sewa atas penjualan opium. Peran mereka sangat besar, dan mereka benar-benar berhasil membangun jaringan bisnis di sektor penangkapan ikan, dan ekonomi nelayan pada waktu itu benar-benar terkait dalam ekonomi komersial.

Pada waktu ini, pendapatan seorang nelayan per tahun rata-rata mencapai sekitar f.180,-. Setelah dipotong berbagai pengeluaran, mereka mendapat penghasilan bersih per tahun sebesar f 60,- atau sekitar f 5,- per bulan, atau sebesar 16,6 sen per hari. Namun bila

diperhitungkan pula uang angsuran yang diserahkan kepada *pachter* untuk pembayaran perahu setiap kali melaut yang besarnya mencapai sekitar 8,30 sen, maka pendapatan seorang nelayan per hari kurang lebih sebesar 24,90 sen. Sedang pendapatan petani Jawa tahun 1870-an sebagai perbandingan hanya sebesar f 5,8 per bulan atau sekitar 19,3 sen per hari. Pendapatan rata-rata penduduk Jawa sendiri perbulan hanya sebesar f 5,5 atau 5 sen per hari. Jadi, pendapatan seorang nelayan per hari sekitar 5 sen lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan penduduk Jawa ataupun pendapatan petani (Masyhuri, 1998; 54-55).

Pendapatan buruh harian di pabrik-pabrik gula pada kurun waktu yang sama sebesar kurang lebih 30 sen per hari. Jadi lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan nelayan. Akan tetapi, apa bila perahu yang dioperasikannya telah terbayar lunas, pendapatan seorang nelayan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan seorang buruh harian pabrik gula. Seorang buruh nelayan, yang ikut memiliki perahu, berpendapatan per tahun f.129,6. Pendapatan mereka dengan demikian hampir dua kali lipat dibandingkan pendapatan seorang petani (*Ibid*). Tabel 4 berikut dengan jelas menunjukkan bahwa nelayan-nelayan yang tergabung dalam organisasi penangkapan ikan dengan pola pemilikan kelompok berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan nelayan lainnya.

Tabel 4

PENDAPATAN BERSIH NELAYAN DENGAN POLA PEMILIKAN KELOMPOK (Tempo dulu)

Th	Nelayan						Pekerja di Pabrik Gula			Petani		
	Sebelum Lunas			Sesudah Lunas								
	Th	Bln	Hari (sen)	Th	Bln	Hari (sen)	Th	Bln	Hari (sen)	Th	Bln	Hari (Sen)
1870	f 60	f 5	16,8	f 128,6		38	f 108	f 9	30	f 70	f 5,83	19,40
1920	f 55	f 4,5	15,2	-	-	-	f 144	f 12	40	f 61	f 3,75	22,50

Sumber : Masyhuri, 1996; Masyhuri, 1998

Dominasi pola pemilikan kelompok terhadap sarana penangkapan ikan mulai mengurang sejak akhir abad-19. Sistem *pachter* di hapus pada pertengahan tahun 1860-an. *Pachter* sebagai sumber modal bagi nelayan tidak lagi berperan, dan tidak lagi menanamkan modalnya di sektor penangkapan ikan. Dengan dihapuskannya sistem tersebut, para *pachter*, atau mantan *pachter*, tidak lagi memiliki hak istimewa untuk membeli garam murah dari pemerintah. Usaha

pengasinan ikan yang mereka kembangkan sebelumnya mengalami kebangkrutan. Pengolahan ikan dengan menggunakan garam dengan harga pasar, yang pada waktu itu penjualannya dimonopoli oleh Pemerintah, tidak lagi memberi keuntungan. Mereka meninggalkan usaha itu, dan juga sektor penangkapan ikan, dan belum ada institusi keuangan resmi lain yang mengganti peran *pachter*.

Yang terjadi adalah munculnya kelompok pelepas uang. Hubungan kerja yang terjalin antara mereka dan nelayan berbeda dengan sebelumnya, tidak lagi bersifat simbiosis, akan tetapi lebih bersifat eksploratif. Sistem penjualan sarana produksi kepada nelayan sebagaimana yang dilakukan oleh *pachter* tidak terjadi lagi. Yang ada adalah peluncuran perahu yang dimiliki secara perorangan, oleh mereka sendiri atau oleh nelayan yang berani mengambil hutang kepada pelepas uang. Sejak ini pola pemilikan individu terus bertambah, sementara pola pemilikan kelompok terus menyusut. Sebagai sistem, pemilikan kelompok tidak dengan serta merta menghilang, tetapi tetap bertahan terus sampai sekarang, meskipun pola pemilikan ini kurang menonjol.

Pendapatan nelayan pun terus merosot. Pada akhir abad ke-19, pendapatan mereka rata-rata berkisar antara f 6,6 dan f 7,5, masih sebanding dengan pendapatan nelayan pada masa sistem pacht masih berlaku. Akan tetapi pada akhir paroh pertama abad ke-20, pendapatan nelayan telah merosot tajam. Pada tahun 1920-an pendapatan seorang nelayan rata-rata per hari sekitar 15,40 sen. Pendapatan seorang buruh harian di pabrik-pabrik gula per hari pada kurun waktu yang sama telah meningkat menjadi 40 sen. Pendapatan petani sendiri pada waktu-waktu ini meningkat menjadi 22,50 sen. Jadi pendapatan nelayan telah tercerai jauh di bawah pendapatan petani (*ibid* : 62). Tampaknya pendapatan nelayan tersebut tidak pemah mengalami kenaikan yang berarti sampai masa-masa belakangan ini. Bisa dimegerti bila dewasa ini terbentuk pandangan bahwa nelayan, khususnya buruh nelayan, merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Sampai sejauh ini, telah tampak bahwa pola pemilikan kelompok atas sarana penangkapan ikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan nelayan. Kasus tentang penghasilan semalam yang mencapai 45 juta rupiah yang telah di kemukakan di depan barangkali akan lebih memperjelas hubungan kausalitas antara pemilikan kelompok tersebut dengan meningkatnya pendapatan nelayan.

Seandainya, unit sarana penangkapan ikan yang dimaksud dimiliki oleh mereka secara bersama-sama maka pendapatan seorang

nelayan anggota kelompok penangkapan tersebut akan berpendapatan jauh lebih besar dari Rp. 930.000,-. Mengapa ? Sebagaimana yang telah disebutkan, perahu nelayan tersebut berukuran 10 GT, dioperasikan oleh 15 orang, dan dengan menggunakan jaring mini purse seine Apabila perahu dan perlengkapan lainnya tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh 15 orang, maka pengeluaran untuk biaya operasional dan sekitar 15 persen untuk perbaikan sarana merupakan pengeluaran dan milik bersama pula. Seterusnya, yakni hasil bersih, dibagi dua, 50 persen untuk juragan dan 50 persen untuk tenaga kerja yang terlibat. Sebanyak 50 persen untuk juragan, karena milik bersama, adalah hak semua nelayan yang memiliki sarana produksi tersebut. Masing-masing dari mereka akan mendapat bagian yang sama. Sedangkan 50 persen selebihnya dibagi sesuai dengan sistem bagi hasil yang berlaku. Seorang nakhoda akan mendapatkan bagian lebih banyak dari seorang nelayan ABK. Dengan sendirinya, dalam kelompok ini, seorang ABK akan menperoleh pendapatan sebesar Rp. 930.000,- ditambah bagian dari pemilikannya atas sarana produksi. Dengan demikian, jelas bahwa pola pemilikan kelompok atas sarana penangkapan ikan akan meningkatkan pendapatan mereka (lihat tabel 5).

Tabel 5

PEMILIKAN KELOMPOK DAN PEMERATAAN PENDAPATAN

Mini Purse Seine/ABK = 15 orang

Produksi

Raman Kotor (Hasil penjualan)	Rp. 45.000.000,-
Pengeluaran bersama	
1. TPI 5 %	Rp. 2.550.000,-
2. Perbekalan	Rp. 150.000,-
3. Cadangan perbaikan 10% (milik bersama)	Rp. 4.500.000 (a=Rp.300.000,-) Rp. 7.200.000,

Raman Bersih

Dibagi dua	
1. Juragan (15 orang)	Rp. 18.900.000,- (a=Rp. 1.260.000,-)
2. ABK (15 orang)	Rp. 18.900.000,- (a=Rp. 1.260.000,-)

Masing-masing nelayan menerima ± Rp. 2.820.000,-

Lebih penting dari itu, bahwa dengan pola pemilikan kelompok pemerataan dalam pembagian hasil tangkapan dapat terwujud. Apabila dalam pola pemilikan individu, sebesar 65 persen dari hasil bersih diterima oleh seorang juragan, maka dalam pola pemilikan kelompok, sebesar 65 persen tersebut diterima secara merata oleh 15 orang. Bisa dimengerti apabila pada saat-saat sekarang ini perekonomian suatu komunitas nelayan dengan dominasi pola pemilikan kelompok atas sarana produksi lebih baik dibandingkan dengan hal serupa dengan dominasi pola pemilikan individual atas sarana produksi.

2.4. Kerangka Konseptual Pemberdayaan Nelayan

Umumnya, masyarakat nelayan terstratifikasi kedalam lapisan masyarakat yang kaya, yang meliputi sebagian kecil anggota masyarakat, dan dilapisan masyarakat yang miskin, yang meliputi sebagian besar anggota masyarakat. Komunitas nelayan di desa Karang Agung (Palang) misalnya dapat diketengahkan sebagai contoh. Di tempat-tempat yang strategis di sepanjang jalan raya jalur pantai Tuban dan Lamongan terlihat pemukiman nelayan yang cukup bagus, tertata rapi, dan mengesankan tingkat perekonomian yang maju dari penghuninya. Hanya saja, pada lapis kedua, dan seterusnya yakni pemukiman nelayan yang ada dibalik tempat-tempat strategis tersebut, menggambarkan keadaan yang kontras, pemukiman yang padat, tidak teratur, dan semrawut, mencerminkan tingkat ekonomi penduduknya yang masih rendah.

Anggota masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di daerah-daerah strategis tersebut jumlahnya tidak banyak. Mayoritas dari penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di lapis kedua, dan lapis ketiga. Karenanya desa nelayan Karang Agung, pada masa program IDT, termasuk desa yang menerima bantuan dari program tersebut. Stratifikasi sosial ekonomi berbentuk piramida. Sebagian kecil kelompok kaya menempati pelapisan teratas, sebagian besar anggota masyarakat terkelompokkan kedalam pelapisan yang terbawah.

Ini berarti bahwa mobilitas sosial vertikal ke atas terjadi terutama pada sekelompok kecil tertentu, yang dalam pelapisan sosial menempati pelapisan teratas tersebut. Sementara sebagian besar anggota masyarakat tidak mengalami mobilitas ke atas, stagnan, atau mengalami mobilitas sosial yang sangat lambat.

Sebuah masyarakat nelayan ideal barangkali adalah apabila kelompok orang kaya meliputi sebagian besar anggota masyarakat. Atau dengan kata lain adalah suatu masyarakat yang secara ekonomi memiliki stratifikasi berbentuk piramida terbalik. Mungkin bentuk ideal

masyarakat seperti itu sulit terwujud atau sulit ditemukan dalam suatu masyarakat, akan tetapi secara konseptual hal seperti itu adalah mungkin bila mobilitas sosial vertikal ke atas terjadi pada sebagian besar anggota masyarakat.

Mobilitas vertikal keatas untuk masyarakat nelayan bukannya hal yang tidak mungkin. Sebagian nelayan sukses di daerah-daerah penelitian saat ini sebelumnya telah menempuh perjuangan hidup yang sulit dan panjang. Mereka berjuang merubah nasibnya dari nelayan buruh menjadi juragan. Mereka mengalami sukses dalam berusaha sebagai nelayan. Ini berarti bagaimanapun beratnya hambatan struktural yang ada, masih ada celah-celah yang memberi kemungkinan seorang nelayan kecil yang tidak bermodal meraih sukses dalam berusaha, mengalami mobilitas keatas dan menjadi juragan.

Dilihat dari proses yang mereka lalui, peran keluarga sangatlah penting. Berdasarkan hubungan keluarga, mereka melakukan kerjasama dalam pengadaan sarana produksi. Di Karang Agung misalnya, peran keluarga seperti ini sangatlah menonjol. Di desa ini, banyak juragan yang dulunya adalah ABK. Pada awal-awalnya, mereka bekerja sebagai ABK perahu milik keluarga sendiri. Sebagai ABK, mereka mendapatkan hak (bagian) yang sama dengan ABK lainnya. Hanya bedanya setelah melalui proses waktu yang cukup, mereka diberi kesempatan untuk memiliki sebagian dari sarana produksi, khususnya jaring. Dengan cara itu, mereka memperoleh pendapatan lebih besar, yakni bagian yang diterimanya karena statusnya sebagai ABK dan bagiannya sebagai pemilik jaring. Pertimbangan mengapa mula-mula memilih jaring dengan pertimbangan bahwa selagi perahu milik saudaranya tidak melaut, jaring tersebut dapat dioperasikan oleh kelompok nelayan lain. Dengan cara ini, meskipun dia tidak melaut dia tetap memperoleh pendapatan, memperoleh bagian yang diperuntukan bagi pemilik jaring.

Modal yang digunakan untuk membeli jaring bisa merupakan modal sendiri, hasil menabung atau modal yang dipinjamkan oleh saudaranya yang terlebih dahulu menjadi juragan darat. Pada tataran ini, nelayan pemilik jaring tersebut mulai mempunyai kemampuan lebih dalam pengumpulan modal. Dari sini, apabila modal yang dimiliki telah cukup, mereka membeli perahu, dan melalui kerjasama dengan nelayan lain yang kebetulan mempunyai mesin pendorong perahu, maka telah terbentuklah satu unit organisasi penangkapan ikan yang baru. Mereka yang memiliki saham terbanyak, misalnya sebagai pemilik jaring dan sekaligus perahu, berstatus sebagai juragan. Demikianlah

pola kecenderungan mobilitas sosial keatas yang terjadi dilingkungan nelayan di desa Karang Agung.

Ada beberapa hal penting yang dapat dikemukakan dari pola mobilitas sosial tersebut. Pertama adalah peran keluarga dalam proses mobilitas sosial keatas yang terjadi di kalangan nelayan. Kedua adalah bahwa pemilik sarana penangkapan ikan secara kelompok merupakan tataran awal dari proses terjadinya mobilitas vertikal keatas.

Masalahnya adalah apa yang perlu dilakukan sehingga proses mobilitas sosial keatas tersebut terjadi secara lebih luas, bukan saja kerjasama berdasarkan hubungan famili, tetapi lebih luas dari itu? Bukanakah makin kuat mobilitas sosial ke atas akan makin mempercepat pembesaran skala pelapisan sosial teratas? Bukanakah dengan demikian berarti pula perekonomian masyarakat nelayan tersebut akan lebih mambai?

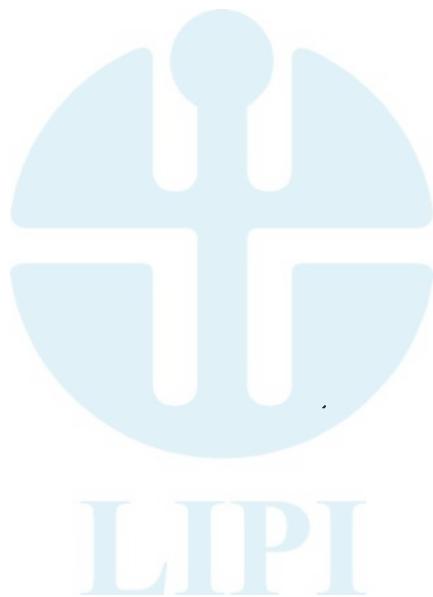
Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan, seperti halnya yang sering muncul di banyak diskusi dan pembahasan, yang meliputi antara lain perubahan aspek teknis, modernisasi teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan SDM, pengembangan pasar, pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah dan sebagainya. Apabila semua itu dapat dilakukan, masalah lain muncul. Apakah perbaikan yang dilakukan tersebut berakibat positif secara merata, atau justru akan lebih mempertajam jurang pemisah yang telah ada antara kelompok kaya dan kelompok miskin?

Sebagaimana yang telah diuraikan di depan, bahwa pola pemilikan kelompok atas sarana produksi berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Telah diungkapkan pula kerjasama kelompok berdasarkan hubungan famili merupakan tataran awal terjadinya mobilitas sosial. Dari sini telah tampak kaitan benang merah antara pemilik kelompok, mobilitas sosial, dan perbaikan ekonomi. Dengan demikian pola pemikiran kelompok dan sistem bagi hasil akan menyebabkan skala dari kelompok nelayan yang berpendapatan lebih baik akan makin banyak, dan kelompok masyarakat yang menempati lapisan sosial teratas akan makin besar. Makin besar pola pemilikan kolektif dan makin besar jumlah anggota masyarakat yang menempati posisi sosial teratas, maka makin baik pula keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Jelaslah, institusi tradisional yang terwujud dalam bentuk kelompok kerja berdasarkan "pola pemilikan kelompok "dalam konteks" sistem bagi hasil" lebih dapat mendorong terjadinya pemerataan pendapatan, dan yang lebih lanjut mendorong makin kuatnya arus

mobilitas sosial vertikal ke atas di kalangan nelayan. Dengan sendirinya, institusi-institusi tersebut merupakan institusi tradisional yang strategis dalam usaha pengembangan masyarakat nelayan.

Dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan dan usahanya, institusi yang strategis tersebut perlu dilestarikan, dikembangkan, atau ditransformasikan kedalam bentuk-bentuk institusi moderen yang dapat mendorong terjadinya pemerataan. Salah satu bentuk intervensi untuk tujuan itu adalah merubah prinsip "paket bantuan modal guliran" kepada nelayan, bukan lagi berdasarkan pola pemilikan individu, tetapi berdasarkan pola pemilikan kelompok.





BAB III

PEMBERDAYAAN NELAYAN: PENGALAMAN LAPANGAN

LIPI

BAB III

PEMBERDAYAAN NELAYAN :

Pengalaman Lapangan

3.1. Lokasi Pemberdayaan

Ujicoba model pemberdayaan nelayan miskin yang menjadi bagian dari penelitian Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI dilakukan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Untuk tahap pertama sekarang ini, diujicobakan pada komunitas nelayan desa Kradenan.

Alasan dilakukan pemilihan lokasi pada desa ini didasarkan atas pertimbangan karakteristik nelayan di desa tersebut yang dikaitkan juga dengan desa-desa nelayan sekitarnya. Desa-desa nelayan di Tuban terletak di sepanjang jalan Daendeles Semarang – Surabaya, yang panjangnya kurang lebih 60 km. Kecamatan Palang letaknya di ujung paling timur Kabupaten Tuban, di daerah berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Di ujung barat Kabupaten Tuban, di daerah berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terletak Kecamatan Bancar dengan sentra komunitas nelayan di desa Bulu Jowo dan Bulu Maduro. Komunitas nelayan di dua daerah yang terletak di dua ujung yang berbeda ini mempunyai karakteristik yang kontras. Dilihat sepintas tidaklah nampak perbedaan antara kedua komunitas masyarakat nelayan di Palang dan Bulu. Jumlah dan ukuran perahu dapat dikatakan hampir-hampir sebanding. Akan tetapi yang pasti adalah kedua daerah tersebut merupakan pusat dari komunitas nelayan yang cukup penting di Kabupaten Tuban. Dari hasil penelitian (Masyhuri, 1998, 1999) dapat diidentifikasi perbedaan-perbedaan yang mendasar antara kedua daerah nelayan tersebut.

Desa-desa nelayan di Bulu termasuk desa yang relatif maju, kurang nampak adanya jurang pemisah antara kelompok masyarakat kaya dengan kelompok yang miskin. Sebaliknya di Palang nampak dengan jelas adanya jurang pemisah antara kelompok kecil nelayan yang kaya dengan nelayan miskin yang meliputi sebagian besar dari anggota masyarakat. Oleh karena itu menurut klasifikasi pemerintah setempat, desa-desa di Palang tersebut dikelompokkan sebagai desa nelayan tertinggal. Hal ini dilatar belakangi adanya kenyataan bahwa nelayan di Palang, sebagaimana kebanyakan nelayan di daerah lain, umumnya tidak pernah terlibat atau bahkan tidak tahu menahu tentang

penjualan ikan hasil tangkapan. Akibatnya peranan tengkulak dan "perantara" dalam penjualan ikan sangatlah dominan dan berperan sangat penting. Hal sebaliknya dengan kebiasaan para nelayan di Bulu, nelayan dan awak kapal (*pandega*) menguasai penuh penjualan ikan langsung kepada pedagang ikan. Bahkan menurut kebiasaan setempat awak kapal yang paling muda ditunjuk bertanggungjawab atas pengurusan uang hasil penjualan ikan. Sehingga dalam hal ini keberadaan perantara kurang begitu mempunyai peranan penting dalam menguasai dan menentukan secara sepahik harga penjualan ikan. Karena awak kapal mempunyai peran sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam menentukan harga ikan maka nelayan anak buah kapal mempunyai *bargaining position* lebih yang cukup kuat dalam penentuan harga ikan.

Mobilitas sosial antara kedua komunitas tersebut cukup kontras pula. Mobilitas sosial di kalangan nelayan Bulu relatif lebih merata pada sebagian besar nelayan. Sebaliknya mobilitas ke atas di kalangan nelayan Palang hanya terjadi pada kelompok kecil tertentu, yakni kelompok pemilik sarana produksi.

Terjadinya perbedaan yang kontras seperti ini antara lain antara komunitas nelayan Bulu diakibatkan oleh adanya perbedaan dalam pola pemilikan sarana produksi penangkapan ikan. Hasil penelitian Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI (Masyhuri, 1998 dan 1999) menunjukkan bahwa pola pemilikan sarana produksi penangkapan ikan pada masyarakat Bulu cenderung lebih banyak pada pola pemilikan kolektif, yaitu berkisar antara 80% - 90% sarana produksi dimiliki oleh sekitar 2-5 orang. Sebaliknya di Palang, pola pemilikan sarana produksi penangkapan ikan, yakni sekitar 80%, dikuasai oleh pemilikan individu. Mobilitas sosial ekonomi ke atas di Palang hanya terjadi pada sekelompok kecil tertentu saja, yaitu kelompok pemilik sarana produksi. Sebaliknya, mobilitas sosial di kalangan nelayan Bulu terjadi secara lebih luas, akibat dari kelompok pemilik sarana produksi yang lebih besar.

Nelayan yang tidak memiliki sarana produksi (buruh nelayan) sangat sulit mengalami mobilitas sosial ekonomi sebagaimana yang terjadi pada nelayan pemilik sarana produksi. Alasan mengapa hal itu terjadi telah di bahas secara mendalam pada bab II. Oleh karena itu sangatlah beralasan bilamana model pemberdayaan yang dikembangkan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI ini diujicobakan pada kelompok nelayan di Palang. Hanya saja karena alasan terbatasnya jumlah dana yang tersedia, tim harus menyeleksi satu kelompok dari berapa kelompok yang terdaftar untuk menerima

modal guliran sebagai ujicoba pemberdayaan. Desa yang dipilih adalah desa Kradenan.

3.2. Latar Belakang Sosial Desa Kradenan

Data statistik Kecamatan Palang (1997) menunjukkan bahwa desa Kradenan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.361 jiwa yang tergabung dalam 535 Rumah Tangga. Angkatan kerja desa tersebut kalau digabungkan antara yang bekerja di sektor nelayan dengan yang bekerja di sektor pertanian secara kumulatif ada sebanyak 65,4%. Observasi yang dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan proporsi yang relatif sama antara yang bekerja di sub sektor nelayan, dengan yang bekerja di sub sektor pertanian pangan.

Tanah pertanian di desa Kradenan relatif tidak subur, hanya bergantung pada pengairan tada hujan. Hanya sebagian kecil sawah, terutama sawah *bengkok* yang dimiliki oleh aparat desa, pengairannya tidak lagi bergantung pada tada hujan tetapi telah mendapat pengairan dari irigasi sederhana. Itulah sebabnya dalam sepanjang tahun, sebagian besar sawah di desa Kradenan hanya ditanami dengan jenis palawija, terutama kacang tanah. Meskipun demikian, sebagian kecil tanah kering di desa Kradenan (5,0 Ha) dimanfaatkan untuk pertambakan yang biasanya ditanami dengan udang ataupun dengan bandeng (*chanos-chanos*). Sebagai salah satu desa yang letaknya di sepanjang jalur Propinsi, maka cukup menonjol adalah sektor perdagangan yang ditekuni oleh sebanyak 11,0% penduduk. Sektor perdagangan yang cukup menonjol di desa ini adalah perdagangan ikan, dan perdagangan barang-barang perbekalan untuk melaut. Selain itu pula berbagai aktivitas rumah tangga perikanan seperti pengeringan ikan, pemindangan dan pengasapan ikan, menjadi mata pencaharian yang cukup penting.

Hal yang menarik diperhatikan di desa Kradenan adalah adanya mobilitas horizontal searah dari sektor pertanian ke sektor nelayan. Sub sektor nelayan selain paceklik dikenal masa-masa panen ikan. Dalam siklus tahunan, ada korelasi antara musim *angin barat* dan *angin Timur*. Musim Barat yang merupakan musim hujan disertai dengan terpaan ombak besar, dikenal oleh nelayan setempat (umumnya oleh nelayan pantain utara Jawa) sebagai masa paceklik. Pada musim ini nelayan rata-rata tidak melaut, mereka lebih banyak di darat memperbaiki perahu atau jaring. Sebaliknya pada musim *angin timur* yang merupakan musim kemarau, dikenal nelayan sebagai musim ikan. Adapun pada siklus bulanan biasanya panen ikan yang waktunya terjadi pada saat bulan gelap. Pada saat-saat seperti ini, sektor

perikanan setempat sering mengalami kekurangan tenaga kerja sebagai awak kapal (*pandega*). Pada saat seperti ini seringkali tenaga kerja sektor pertanian akan mengisi formasi sektor perikanan sebagai tenaga tidak tetap. Akan tetapi hal sebaliknya tidak terjadi bila sektor pertanian sedang panen maka nelayan tidak akan mungkin memasuki sektor pertanian. Kebiasaan-kebiasaan kerja sebagai petani oleh kebanyakan nelayan dirasakan sangat berat dan membosankan.

Mengamati struktur sosial masyarakat nelayan di desa Kradenan, secara umum menunjukkan adanya dua pola pengelompokan besar yang saling berindikasi dan saling memerlukan satu dengan lainnya. Kelompok pertama adalah kelompok produsen yang terdiri dari para nelayan yang menangkap ikan di laut. Kelompok kedua, adalah kelompok perantara yang meliputi pedagang, juragan atau istri juragan yang menampung ikan hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dijualnya lagi kepada pengecer atau ke pasar. Kelompok perantara ini dapat dikatakan sebagai institusi yang menjembatani antara nelayan dengan pasar.

Adapun struktur sosial di dalam kelompok produsen meliputi nelayan yang memiliki alat produksi berupa perahu dan peralatan penangkap ikan. Kelompok ini lebih dikenal sebagai *juragan*. Selain itu ada pula kelompok nelayan yang bekerja pada pemilik perahu sebagai buruh, yang disebut dengan nama *pendega* atau istilah setempat menyebutnya dengan nama *blah*. Di antara para buruh nelayan ini ada seorang yang ditunjuk oleh juragan untuk memimpin penangkapan di laut, memimpin penangkapan ikan di laut disebut dengan nama *juragan laut*. Di Kradenan rata-rata yang disebut *juragan laut* adalah juga sebagai pemilik perahu, yang memimpin kelompok penangkapan yang berjumlah antara 3 sampai 4 orang awak.

3.3. Teknik Pemilihan Kelompok dalam Pemberdayaan Nelayan

Pemilihan kelompok dalam model pemberdayaan masyarakat nelayan tidak terlepas dari hasil temuan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI (Masyhuri, 1998 dan 1999).

Penelitian lapangan tersebut menghasilkan temuan bahwa di beberapa desa di Kecamatan Palang ada pengelompokan teratur yang membentuk suatu organisasi kenelayanan dengan anggota didasarkan pada pemilikan sarana penangkap ikan, baik yang berupa perahu maupun kapal. Temuan terhadap adanya organisasi nelayan yang ada tersebut kemudian didiskusikan dengan instansi Dinas Perikanan setempat. Dari hasil diskusi tersebut dipilih dua organisasi nelayan

yang masing-masing terletak di desa Gesikharjo dan Kradenan yang menurut penilaian mempunyai kinerja paling baik. Kinerja yang dinilai adalah :

1. Kedisiplinan dalam mengembalikan guliran alat yang pernah diintrodusir oleh Dinas Perikanan
2. Kejujuran para anggotanya, terutama ketua kelompok.
3. Kelompok tersebut menggunakan perahu jenis *Srool* dan alat tangkap *dogoel*.

Tim kemudian mendatangi satu per satu organisasi nelayan tersebut untuk melakukan wawancara mendalam, mengadakan diskusi dengan ketua dan beberapa anggota organisasi nelayan. Dalam kesempatan berdiskusi tersebut tim memperkenalkan pola pemberdayaan nelayan dengan sistem pinjaman satu paket alat tangkap yang pengembaliannya dilakukan melalui pola bagi hasil sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh nelayan setempat. Dari hasil diskusi dan wawancara mendalam tersebut kedua organisasi nelayan memperlihatkan ketertarikan dengan sistem yang diperkenalkan.

Hasil kunjungan ke organisasi di desa Gesikharjo dan desa Kradenan tersebut selanjutnya dikonsultasikan dan didiskusikan lagi dengan instansi Dinas Perikanan untuk dapat menentukan satu dari dua yang harus dipilih. Alasan harus memilih satu kelompok penangkapan pada satu organisasi nelayan dikarenakan oleh dana yang tersedia hanya cukup untuk membeli sebuah perahu lengkap dengan perangkatnya. Hasil diskusi dengan Kepala dan Wakil Kepala Dinas Perikanan Tuban serta petugas Penyuluhan Lapangan Wilayah Kecamatan Palang, akhirnya diputuskan bahwa organisasi dari desa Kradenan yang dipilih untuk ujicoba pemberdayaan nelayan miskin. Organisasi nelayan yang dipilih tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama *Bunga Samudra*. Pemilihan atas organisasi tersebut didasari pada alasan :

1. Ketua organisasi masih muda, dan ditokohkan oleh kalangan pemuda tempat.
2. Anggota Organisasi *Bunga Samudra* mempunyai kekhususan dalam menangkap ikan hanya mempergunakan perahu *Srool* dan alat tangkap *dogoel*. Adapun organisasi nelayan dari desa Gesikharjo lebih bervariasi, selain menangkap dengan perahu *Srool* juga dengan perahu yang sedikit lebih besar yaitu perahu *gardan*.
3. Pemasaran untuk hasil tangkap perahu *Srool* lebih dekat jaraknya dengan desa Kradenan, sehingga pengawasan dalam penjualan hasil tangkapan nantinya relatif lebih mudah.

Setelah memutuskan organisasi Bunga Samudra yang dipilih, kemudian tim secara resmi meminta pengurus Bunga Samudra untuk membentuk kelompok penangkapan yang terdiri dari para buruh nelayan (*pandega*) yang mengawaki perahu milik anggota Organisasi Bunga Samudra.

Dari seluruh nelayan yang terdaftar sebagai buruh nelayan (*pandega*) yang mengawaki perahu milik anggota organisasi Bunga Samudra yang berasal dari desa Kradenan, ada sebanyak 28 orang yang belum mempunyai perahu ataupun alat tangkap. Mereka ini disebut dengan istilah *blah tempo*. Dari sebanyak 28 *blah tempo* tersebut maka harus dipilih satu kelompok penangkapan yang anggotanya terdiri dari 4 orang. Pada awalnya tim mempercayai pengurus untuk membentuk kelompok yang akan diberi guliran. Kelompok yang terpilih dan daftarnya disodorkan untuk menerima pengguliran adalah *blah tempo* yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pengurus inti, baik itu saudara ataupun hubungan rasional lainnya sebagai tetangga, tanpa melalui musyawarah dengan sebagian besar anggota yang lainnya. Tim peneliti kurang menyadari peranan penunjukan kelompok tersebut, karena tim sebagai orang luar lebih mempercayakan penunjukan kelompok kepada pengurus Bunga Samodra. Persoalan baru disadari menjadi permasalahan serius sewaktu terjadi intrik dalam masyarakat yang kurang setuju dengan penunjukan tersebut. Kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi tim peneliti untuk segera membatalkan penunjukan kelompok terpilih melalui persetujuan sebagian besar pengurus Bunga Samudra. Permasalahan ini selanjutnya didiskusikan dengan pengurus Bunga Samudra untuk dicarikan pemecahannya, diambil keputusan secara musyawarah bahwa akan dibentuk kelompok-kelompok calon penerima dengan tetap mempertahankan asas subjektivitas pengurus sebagai referensi. Dengan kata lain kelompok akan dibentuk berdasarkan hubungan patron-klien yang hidup dan mentradisi di kalangan mereka.

Prioritas yang dijadikan kelompok adalah *blah tempo* yang masih muda, mendapatkan referensi kejujuran dan kerajinan dari pengurus serta bersedia menerima pinjaman seperangkat alat tangkap dari LIPI. Rekomendasi dari pengurus Bunga Samudra kemudian dapat diidentifikasi ada sebanyak 16 orang *blah tempo* yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh guliran. Dari sebanyak 16 orang tersebut dikumpulkan untuk membentuk sendiri pengelompokan menjadi 4 kelompok penangkapan yang didasarkan pada :

1. Kedekatan tempat tinggal.
2. Keakraban satu anggota dengan anggota lainnya
3. Adanya kepercayaan satu anggota dengan anggota lainnya.

Dasar pembentukan kelompok yang dilakukan sendiri oleh calon penerima guliran dilatar belakangi oleh keinginan kerjasama kelompok yang erat, adanya solidaritas diantara anggota kelompok dalam kerangka penangkapan ikan. Dalam hal ini unsur primordial dan nepotisme dalam kelompok penangkapan diabaikan, karena secara psikologis hubungan yang telah akrab di antara anggota kelompok sangat penting dalam suatu pelajaran di laut. Menurut Acheson (1981) telah adanya hubungan yang akrab sangat mengefektifkan kerjasama dalam kelompok kerja, ketenangan kerja dan keamanan semua pihak. Kerjasama juga harus dilakukan untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya kepada penyedia modal.

Oleh karena itu kerjasama dalam kelompok harus memenuhi :

1. Kerjasama kelompok dalam penangkapan
2. Kerjasama kelompok dalam pemeliharaan sarana produksi
3. Kerjasama kelompok dalam mengangsur kredit.
4. Kerjasama kelompok untuk bersama-sama memiliki sarana produksi (bila lunas).

Dari sebanyak 4 kelompok yang telah terbentuk tersebut, maka dipilih satu kelompok yang pertama kali akan menerima guliran. Pemilihan dilakukan melalui undian secara terbuka yang diadakan di Balai Desa Kradenan, dengan dihadiri oleh :

1. Peneliti Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tuban
3. Kepala Kecamatan dan Sekretaris Kecamatan Palang
4. Kepala dan Perangkat Desa Kradenan
5. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Kecamatan Palang
6. Anggota LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan LMD (Lembaga Musyawarah Desa) desa Kradenan.
7. Pengurus dan anggota Organisasi Nelayan Bunga Samudra

Jumlah yang hadir untuk menyaksikan undian ada sekitar 30 orang yang mewakili aspirasi kelompok masyarakat nelayan setempat. Hasil undian telah dapat menentukan satu kelompok yang akan menerima guliran pertama kali. Adapun kelompok lain yang berjumlah tiga (3) kelompok direncanakan akan menerima guliran tahap berikutnya bilamana kelompok pertama telah selesai mengangsur dan melunasi hutangnya dengan pembayaran melalui sistem bagi hasil yang telah mentradisi di kalangan nelayan. Oleh karena masih ada

kelompok yang belum menerima guliran, maka modal yang dipinjamkan kepada kelompok terpilih harus dapat kembali. Untuk itu ditekankan kepada yang menghadiri undian, terutama kelompok yang belum menerima guliran, agar dapat menghidupkan fungsi kontrol supaya semua kelompok dapat menerima guliran secara lebih cepat.

3.4. Forum Diskusi dan Pelatihan

“Pelatihan” dalam pengertian ini tidak dimaksudkan menganggap secara apriori bahwa nelayan setempat perlu dilatih dalam memecahkan persoalan kenelayanan, karena secara tradisional mereka jauh lebih mengetahui permasalahan sendiri dari pengalamannya selama bertahun-tahun bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi “pelatihan” yang dimaksudkan di sini lebih menonjolkan pada soal mendiskusikan dan bersama-sama belajar pada masalah manajemen usaha, pengelolaan usaha secara kelompok serta bagaimana mengorganisasi kelompok secara benar. Untuk itu metode diskusi lebih ditonjolkan guna secara bersama-sama memikirkan pola kerjasama kelompok yang baik dan dapat memperoleh hasil secara adil.

Nelayan dikumpulkan dalam forum diskusi dan pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pembentukan kelompok guliran. Forum Pelatihan dilakukan untuk seluruh anggota Bunga Samudra, baik pengurus, anggota yang telah mempunyai sarana alat tangkap maupun anggota *blah tempo* yaitu yang tidak mempunyai sarana alat tangkap. Maksud dilakukannya pelatihan kepada seluruh anggota adalah agar supaya secara bersama-sama dapat mengetahui dan memecahkan permasalahan mengenai 1. Jenis kebutuhan yang sebenarnya paling diinginkan nelayan

2. Jumlah dana yang mampu disediakan pemberi dana
3. Prosedur yang harus ditempuh dalam memberikan pinjaman kepada nelayan

3.4.1. Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun di Jakarta dengan mempertimbangkan semua aspek yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini inti yang terpenting dari materi pelatihan adalah menguji model yang akan diterapkan dalam pelaksanaan penelitian pemberdayaan nelayan.

Tahap pertama adalah mendiskusikan cara-cara khusus dalam usaha pemberdayaan dengan melakukan pemaparan perlu tidaknya

usaha pemberdayaan nelayan. Dalam hal ini *pemberdayaan* diartikan sebagai usaha yang memungkinkan sumber daya manusia yang ada yaitu masyarakat nelayan mampu mengembangkan diri dan meningkatkan taraf perekonomiannya sehingga secara bertahap mereka menjadi kelompok yang berhasil secara sosial maupun ekonomi. Kartasasmita (1996 : 144) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti *memampukan* dan *memandirikan* masyarakat. Meskipun demikian peneliti berusaha menghindarkan pemikiran *bias* pemikiran yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa menganggap masyarakat nelayan dan masyarakat desa pada umumnya sebagai masyarakat yang lemah, bodoh, tidak efisien dan tidak mampu menentukan nasib serta kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat nelayan, terutama nelayan tradisional, dalam hal ini sama dengan masyarakat miskin (Mubiyarto, 1994). Pandangan tersebut cukup memberi pengaruh kuat terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam mengembangkan masyarakat nelayan. Dalam pelaksanaan program Pembangunan, selama ini pemerintah lebih menempatkan masyarakat nelayan sebagai obyek, bukan subyek pelaksana Pembangunan. Untuk itu tim berusaha menggali permasalahan dari masyarakat nelayan sendiri (*bottom-up*), dan secara bersama-sama dicari pemecahan masalahnya metode diskusi dianggap penting untuk dapat memunculkan ide-ide cemerlang dari masyarakat nelayan.

Kendala selama ini yang menyebabkan terjadinya hambatan usaha ekonomi nelayan adalah adanya realita struktur perekonomian nelayan. Untuk itu diskusi yang dilakukan lebih banyak menggali permasalahan dan mencari jalan keluar adanya realita terhadap :

1. Pola pemilikan kelompok sarana penangkapan ikan dihadapkan dengan pola pemilikan individual
2. Struktur ekonomi masyarakat nelayan antara *juragan darat-pandega* dalam kaitannya dengan porsi bagi hasil antara yang diterima juragan dengan yang diterima pandega.

Disadarinya adanya realita sosial tersebut diharapkan mampu diperoleh jalan keluar pemecahannya untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Ini dikarenakan mobilitas sosial ke atas dapat terjadi dengan lebih merata bila mana ada perluasan kelompok pemilik sarana produksi diantara masyarakat. Semakin banyak pemilik sarana produksi maka akumulasi modal dapat terjadi melalui pola bagi hasil yang selama ini telah dikenal meluas di kalangan nelayan.

3.4.2. Keterkaitan Program dengan Dinas Perikanan

Pemberdayaan nelayan telah menjadi program yang dilakukan oleh instansi Dinas Perikanan setempat melalui pola pengguliran sebagaimana yang dilakukan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI. Program pengguliran untuk nelayan, khususnya di Palang, telah dilakukan sejak tahun anggaran 1993/94. Laporan evaluasi atas program tersebut yang dilakukan Dinas Perikanan menunjukkan adanya tingkat keberhasilan yang cukup relevan.

Ada perbedaan yang diterapkan antara pola yang dipergunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan pola yang diujicobakan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

a. Pemberdayaan Nelayan Pola Dinas Perikanan

Prinsip dasar yang dipergunakan oleh Dinas Perikanan setempat dalam memberikan guliran kepada masyarakat nelayan bertujuan untuk mengembangkan jumlah sarana penangkapan ikan. Dalam hal ini pola guliran yang diterapkan mengacu pada pinjaman peralatan secara parsial.

Dinas Perikanan setempat memberikan guliran berupa peralatan tangkap kepada nelayan yang telah mempunyai modal, artinya guliran hanya diberikan kepada nelayan yang telah mempunyai sarana produksi berupa perahu. Pemberian diberikan kepada anggota organisasi dalam bentuk kredit barang terutama mesin perahu ataupun jaring penangkap ikan secara parsial dan diberikan kepada nelayan melalui individual. Angsuran dilakukan setiap bulan, secara musyawarah antara pihak pemberi dan penerima kredit yang diwakili organisasi nelayan, meliputi jumlah angsuran, mekanisme pengembalian, sampai berapa kali angsuran dianggap lunas. Hasil dari pengembalian angsuran tersebut kemudian digulirkan lagi kepada individu nelayan lainnya dalam satu organisasi yang sama. Dalam hal ini peranan anggota organisasi lainnya yang belum mendapatkan guliran, termasuk pengurus sangat penting menjadi pengontrol dalam ketepatan anggota membayar angsuran.

Biasanya kelompok yang tingkat keberhasilan dalam mengembalikan angsuran cukup baik adalah kelompok yang ketuanya memperoleh pinjaman paling belakang. Ketua kelompok akan secara aktif menagih tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh anggota kelompoknya. Dari program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tuban menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah mesin penggerak

perahu dan jumlah jaring penangkapan ikan. Jumlah motor tempel telah meningkat dari 2.475 buah pada tahun 1997 menjadi 2.657 buah pada tahun 1998 (Dinas Perikanan Kabupaten Tuban, 1999 : 24). Ini menunjukkan terjadinya kenaikan motor tempel sebanyak lebih kurang 7,35%. Sebaliknya jumlah perahu yang tidak mempergunakan motor tempel, yaitu perahu layar mengalami penurunan dari 380 buah (1997) menjadi 323 buah (1998). Peningkatan tersebut selain disebabkan oleh pemberian paket guliran kepada individu anggota kelompok nelayan juga dikarenakan terjadinya proses kebutuhan motorisasi dan modernisasi perikanan dari perahu layar menjadi perahu motor yang dilaksanakan sendiri oleh nelayan.

b. Model Pemberdayaan Nelayan Pola PEP-LIPI

Pola pemberdayaan yang diujicobakan PEP-LIPI relatif sama dengan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Tuban, yaitu sistem pengguliran dalam bentuk sarana penangkapan ikan. Akan tetapi perbedaan yang cukup menyolok pada pola pengguliran yang dilakukan oleh PEP-LIPI adalah sebagai berikut :

1. Paket guliran yang berupa sarana produksi penangkapan ikan tidak diberikan dalam bentuk parsial, tetapi diberikan dalam bentuk satu unit lengkap sarana penangkapan ikan.
2. Bantuan tidak diberikan kepada nelayan pemilik perahu, tetapi diberikan terutama kepada buruh nelayan atau *blah tompo*.
3. Bantuan tidak diberikan kepada nelayan secara individu, tetapi kepada sekelompok nelayan.
4. Sarana produksi setelah lunas terbayar merupakan milik kelompok.

Persyaratan penerima modal guliran adalah nelayan buruh (*blah tompo*) yaitu nelayan yang tidak mempunyai sarana produksi sendiri. Secara ekonomi *blah tompo* adalah kelompok nelayan yang terlemah dibandingkan kelompok-kelompok nelayan lainnya. Kelompok ini biasanya sangat tergantung pada juragan darat, bahkan seringkali secara sosial terikat hutang yang jarang dapat dilunasi. Adapun akses ke pasar tidak dipunyai kelompok ini, penjualan ikan seringkali harus melalui juragan darat.

Oleh karena dilakukan melalui pola kerjasama, maka harus disepakati terlebih dahulu persyaratan yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesepakatan antara kedua belah pihak diwujudkan dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan alat tangkap yang harus ditanda tangani kedua belah pihak dengan saksi dari instansi formal

setempat.. Intisari perjanjian adalah Pihak pertama, yaitu pemberi modal, menyediakan seperangkat peralatan tangkap ikan yang berupa perahu, mesin jaring tangkap dan segala perlengkapannya. Dari seluruh peralatan yang digulirkan kepada nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Tuban menyediakan modal pendampingan dalam bentuk mesin penggerak merek Don Feng 12 PK. Adanya pendampingan ini diharapkan aktivitas kegiatan nelayan dapat secara rutin dimonitor oleh Dinas Perikanan setempat, dikarenakan adanya barang yang disertakan dalam program uji model pengguliran yang dilakukan oleh LIPI. Oleh karena itu telah disepakati disusun perjanjian tersendiri antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI.

Adapun Pihak Kedua, yaitu kelompok nelayan penerima guliran bertanggungjawab atas :

1. Perawatan perahu, mesin dan jaring
2. Melakukan perbaikan bilamana terjadi kerusakan perahu, mesin dan jaring yang dananya diambilkan dari cadangan perbaikan.
3. Pengoperasian alat produksi untuk penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan kelaziman penangkapan ikan setempat.
4. Ketepatan kelompok dalam melaksanakan dan memenuhi aturan main kerjasama sebagaimana telah disepakati bersama.

Kelompok diharuskan memenuhi dan mentaati ketentuan yang telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, akan dilakukan peninjauan ulang terhadap kerjasama. Konsekuensi paling ekstrim adalah pemutusan hubungan kerjasama dan penarikan kembali sarana produksi yang telah diserahkan sebelumnya.

3. 5. Mekanisme Pengadaan Barang dan Pengelolaan Usaha

Sebagaimana telah disebutkan di atas, modal pengguliran diberikan dalam bentuk seperangkat alat tangkap ikan. Modal diberikan dalam bentuk sarana produksi, artinya modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Berkaitan dengan bentuk modal yang diberikan adalah berupa barang, maka telah dilakukan diskusi dengan kelompok sasaran jenis barang yang diperlukan. Semua kebutuhan barang disinkronkan dengan anggaran yang tersedia, persyaratan administratif yang diperlukan dan situasi objektif lainnya. Dengan pertimbangan jumlah dana yang tersedia dan hasil musyawarah dengan kelompok sasaran, maka pengguliran yang diberikan kepada kelompok sasaran adalah :

1. Perahu *Srool* (*dogol*)
2. Mesin tempel Merek Don Feng 12 PK
3. Jaring Dogol (Payang Teri)
4. Jaring Senar (*Filamen*)

Pada awalnya direncanakan akan dibeli seperangkat perahu *Srool* yang kondisi fisiknya antara 70% sampai dengan 75%, dengan argumentasi bahwa pembelian perahu bekas menjadikan kelompok nelayan sasaran akan dapat segera mengoperasikan gulirannya. Selain itu secara objektif juga mempertimbangkan jumlah anggaran yang tidak mencukupi untuk membeli seperangkat alat tangkap baru. Akan tetapi adanya keharusan administrasi proyek yang tidak memperbolehkan pembelian barang bekas, disamping telah adanya kesanggupan pendampingan mesin tempel dari Dinas Perikanan setempat, maka perahu yang dgulirkan dapat dibelikan dalam kondisi baru. Untuk itu tim mencari galangan kapal yang dapat secara administratif memenuhi persyaratan pembuatan perahu. Persyaratan administratif itu sangat penting dikarenakan kebanyakan galangan perahu di sekitar Tuban (yaitu di Paciran, Lamongan dan Sarang, Rembang) adalah galangan-galangan dalam kategori tradisional. Dalam hal ini penduduk mempunyai ketrampilan membuat perahu dan kapal sesuai pesanan, akan tetapi mereka itu sangat tidak memperhatikan masalah administrasi formal. Atas saran dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Tuban yang pernah melakukan proyek pengadaan perahu, maka dipilihlah galangan kapal "UD Barokah Jaya" yang terletak di Paciran, Lamongan. Galangan kapal ini dipilih karena secara administrasi dapat menyediakan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan administrasi proyek. Yang di luar perhitungan adalah pemesanan perahu dengan kondisi baru ternyata masih belum diperlengkapi dengan peralatan pendukung seperti jangkar, tali dan layar. Oleh karena itu diperlukan tambahan dana untuk menyediakan tambahan peralatan perahu yang cukup fital tersebut.

Perkembangan dapat dibelinya perahu dalam kondisi baru, dilakukan melalui pesanan, tidak terlepas dari adanya dana pendampingan dari Dinas Perikanan Tuban dalam bentuk mesin penggerak. Kalau mempertimbangkan hasil musyawarah dengan kelompok nelayan, maka mesin yang disukai adalah merek Kubota 8 ½ PK. Mesin jenis ini relatif sangat kuat, jarang rusak akan tetapi harganya mahal. Adapun dana pendampingan dari Dinas Perikanan akan diberikan dalam bentuk mesin merek Don Feng 12 PK, oleh karena itu melalui persetujuan dengan nelayan yang akan menerima

pengguliran maka akhirnya disepakati mesin merek Don Feng tersebut yang akan diterima. Hal yang sama terjadi dalam pembelian jaring dogol maupun jaring senar.

Jaring *dogol* dan jaring *senar* tidak tersedia secara utuh di toko-toko penjual peralatan nelayan. Kebiasaan yang umum dilakukan kalangan nelayan adalah membeli bahan baku jaring di toko penjual peralatan nelayan, kemudian membuat sendiri atau meminta jasa orang lain dengan mengupah untuk membuat jaring. Adanya kebiasaan seperti itu yang harus diantisipasi oleh tim. Permasalahannya adalah membuat jaring *dogol* membutuhkan waktu pembuatan yang tidak pendek, tetapi bisa sampai berbulan-bulan dikarenakan kebiasaan nelayan baru mengerjakan pembuatan jaring sepulang dari melaut pada siang hari ataupun pada saat-saat yang senggang. Dalam hal ini di sekitar Tuban tidak ditemukan tenaga khusus yang secara penuh bersedia diupah membuat jaring, kecuali tenaga paroh waktu dari para nelayan. Untuk menanggulangi hal itu, tim yang dibantu para nelayan anggota kelompok Bunga Samudra mencari informasi di beberapa tempat terhadap adanya nelayan yang telah selesai atau hampir selesai membuat jaring dogol. Dari berbagai jaringan informasi nelayan, akhirnya dapat ditemukan seorang nelayan yang bersedia menjual jaring dogol yang telah hampir selesai dibuatnya dengan harga yang masih dalam jangkauan. Sedangkan untuk menyediakan jaring senar, terpaksa tim membeli bahan dasar dari toko untuk kemudian meminta jasa orang lain dan mengupah untuk mengerjakannya secara paroh waktu. Pembuatan jaring senar tidak serumit membuat jaring dogol, disamping itu tidak diperlukan bahan sebanyak bahan untuk membuat jaring dogol. Oleh karena itu dalam jangka waktu sebulan jaring senar ini sudah siap dipergunakan.

Dalam hal ini peralatan tangkap yang digulirkan kepada kelompok sasaran beserta nilai ril kreditnya adalah :

Tabel 6

Jenis Barang yang Digulirkan dan Nilai Kredit

No.	Jenis Barang	Nilai Kredit (Rp)
1.	Perahu <i>Srool</i> (<i>Dogol</i>)	14.300.000,-
2.	Mesin Merek Don Feng 12 PK	3.600.000,-
3.	Jaring <i>Dogol</i>	4.400.000,-
4.	Jaring Senar (<i>Filamen</i>)	2.600.000,-
5.	Jangkar, tali, layar dsb.	1.900.000,-

Perangkat alat tangkap ikan tersebut dikelola dan diusahakan sendiri oleh kelompok sasaran, hasil tangkapan diusahakan agar dijual sendiri oleh kelompok nelayan dengan monitoring dari pengurus Bunga Samudra.

Hasil penjualan dibagi dua antara kelompok nelayan dengan pemilik modal, yaitu PEP – LIPI sampai dianggap lunas bilamana telah terpenuhi angsuran seharga perahu dan peralatannya ditambah sekitar 10% sebagai estimasi kenaikan harga barang. Diberlakukannya pola bagi hasil dengan pertimbangan sistem ini telah menjadi tradisi yang sudah dilakukan sejak lama oleh kalangan nelayan. Tradisi sistem bagi hasil di kalangan nelayan dilatarbelakangi bahwa sektor penangkapan ikan memberikan hasil yang tidak menentu. Bilamana nelayan berhasil menangkap ikan dalam jumlah banyak, maka mereka akan mendapatkan penghasilan cukup banyak. Sebaliknya, kadangkala nelayan tidak memperoleh ikan sama sekali. Faktor keberuntungan dan faktor musim sangat mempengaruhi perolehan tangkapan. Didasari oleh pola pendapatan nelayan yang tidak menentu inilah, maka mereka mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap pola pendapatan yang tidak teratur. Salah satunya adalah sistem bagi hasil.

Secara tradisi, juragan darat (pemilik modal) akan memperoleh bagian dari bagi hasil tersebut lebih dari separo bilamana ditambah dengan cadangan-cadangan perbaikan, sedangkan selebihnya akan diterima oleh kelompok penangkap. Pola bagi hasil ini nampaknya tetap akan dipertahankan nelayan, selagi pendapatan nelayan senantiasa tidak teratur dan tidak dapat ditentukan kepastiannya. Dalam hal ini intervensi pemberdayaan yang diujicobakan oleh PEP-LIPI adalah, sekitar separo dari bagi hasil yang menjadi bagian juragan darat (PEP-LIPI) dianggap sebagai angsuran. Bilamana angsuran telah dapat dilunasi dari hasil bagi tangkapan tersebut, maka kelompok nelayan secara otomatis berhak memiliki perangkat alat tangkap tersebut. Dalam hal ini perbedaan dengan pola yang dilakukan Dinas Perikanan Tuban adalah, angsuran tidak dibatasi jumlahnya dan jangka waktunya, tetapi dapat dilakukan setiap hari ataupun setiap saat melaut. Oleh karena itu, titik kritis dari sistem ini adalah tingkat kejujuran nelayan dalam melaporkan hasil tangkapan dari hasil penjualan ikan. Oleh karena itu diperlukan monitoring dan pengawasan secara teratur. Monitoring dilakukan sendiri oleh peneliti PEP-LIPI secara berkala, dan monitor harian dilakukan oleh Pengurus Bunga Samudra yang memberikan rekomendasi pemilihan anggota kelompok. Monitoring tenaga peneliti setidaknya akan dapat mengetahui kelancaran dan berhasil tidaknya model intervensi untuk pemberdayaan masyarakat nelayan. Selain itu juga untuk melihat perubahan sosial ekonomi masyarakat sasaran dengan diberlakukannya model intervensi

tersebut. Adapun monitoring dan pengawasan tenaga dari pengurus Bunga Samudra dilakukan untuk mengawasi :

1. Hasil tangkapan ikan kelompok nelayan
2. Hasil penjualan ikan yang ditangkap
3. Permasalahan interen pada kelompok sasaran
4. Aliran uang angsuran ke rekening

Konsekuensi dengan keterlibatan pengurus Bunga Samudra untuk menjadi tenaga pengawas lapangan dari sistem ujicoba yang dilakukan PEP-LIPI adalah, berhak diberikannya imbalan untuk operasional kerja mereka. Imbalan tidak diberikan kepada perorangan, tetapi kepada kelompok Bunga Samudra. Imbalan tersebut diambilkan dari *uang tengah*¹ yang masih menjadi hak kelompok nelayan dan juragan darat.

Sebagai gambaran di bawah ini akan diuraikan pola-pola hasil bagi dalam setiap kali melaut yang disepakati antara peneliti LIPI dengan kelompok nelayan setempat. Bagi hasil yang diterapkan dalam ujicoba ini dilakukan dengan sedikit modifikasi dari tradisi bagi hasil kelompok nelayan dengan juragan darat yang telah dikenal sejak lama. Modifikasi terhadap tradisi bagi hasil ini dilakukan dengan berkali-kali mengadakan diskusi dengan kelompok, dan berkali-kali pula dilakukan perubahan untuk mencapai kesesuaian diantara kedua belah pihak. Adapun dilakukannya modifikasi terhadap tradisi bagi hasil, dimaksudkan untuk mengakomodasi pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan monitoring. Persetujuan nelayan terhadap modifikasi tidak terlepas dari keuntungan akhir kelompok nelayan, bahwa sarana penangkapan ikan tersebut suatu saat akan menjadi hak milik kelompok. Bila dalam tradisi bagi hasil, sampai kapanpun sarana penangkapan ikan tetap menjadi hak milik pemilik modal (*juragan darat*). Oleh karena itu bisa dimengerti apabila sistem bagi hasil dengan pola pemilikan individu menyebabkan terjadinya akumulasi modal pada nelayan pemilik sarana produksi. Adapun sistem bagi hasil dengan pola pemilikan kelompok, maka akumulasi modal terjadi tidak pada perseorangan tetapi pada kelompok tersebut. Dalam hal ini modifikasi dari sistem tradisi bagi hasil yang dikembangkan melalui diskusi panjang dengan nelayan, adalah sebagai berikut :

¹ Dalam hal ini yang disebut dengan *uang tengah* adalah uang hasil penjualan ikan (hasil penjualan raman) yang belum dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran kapal.

1. Pendapatan dari setiap kali melaut atau pendapatan *raman* dibagi menjadi sembilan (9) bagian. Sebanyak empat (4) bagian menjadi hak seluruh anggota kelompok nelayan. Sebanyak empat (4) bagian lagi menjadi hak *juragan darat* (PEP-LIPI), sedangkan satu (1) bagian sisanya dipakai untuk :
 - a. Sebanyak setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari satu (1) bagian dipergunakan sebagai cadangan perbaikan peralatan dan kebutuhan operasional penangkapan ikan.
 - b. Sebanyak seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari satu (1) bagian dipergunakan untuk operasional monitoring dan pengawasan kelompok Bunga Samudra.
 - c. Sebanyak seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari satu (1) bagian untuk operasional monitoring dan pengawasan PEP-LIPI dan Dinas Perikanan Tuban.
2. Hasil bagi untuk *juragan darat* (PEP-LIPI) diambil seperempat ($\frac{1}{4}$) dari satu (1) bagian untuk diberikan kepada *burit*, dan setengah ($\frac{1}{2}$) dari satu (1) bagian diberikan kepada *tekong (juru mudi)*. Bagian tersebut langsung diterimakan kepada masing-masing yang bersangkutan.
3. Bagian untuk *juragan darat* (PEP-LIPI) setelah dikurangi bagian untuk *burit* dan *tekong* adalah merupakan angsuran kelompok kepada pemilik modal (PEP-LIPI).
4. Hasil bagi untuk kelompok nelayan sepenuhnya diserahkan kepada kelompok ABK (*blah*) dan dibagi kepada anggota kelompok *blah* sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Perlu ditekankan di sini bahwa dana cadangan perawatan alat dan perahu serta perbekalan, sepenuhnya menjadi hak dan dimiliki oleh *juragan darat* (pemilik modal). Hanya saja dikarenakan dana ini dapat dibutuhkan sewaktu-waktu untuk perbaikan peralatan dan perahu, sedangkan pemilik modal tidak setiap saat bisa ditemui, maka diambil kesepakatan bahwa pengelolaan dana ini dipercayakan kepada pihak Bunga Samudra. Untuk itu fasilitas perbankan dari BRI Unit Desa setempat akan dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat pemilik modal dan kelompok Bunga Samudra membuka rekening.

Uang angsuran kepada pemilik modal (*juragan darat/PEP-LIPI*) oleh kelompok nelayan harus disetorkan langsung ke rekening atas nama pemilik modal. Demikian pula dana cadangan perbaikan yang menjadi hak kepemilikannya pada pemilik modal harus disetor ke rekening tersendiri yang terpisah dengan rekening pertama (pemilik modal), rekening ini disepakati diatas namakan kelompok Bunga

Samudra. Adapun dana operasional monitoring untuk PEP-LIPI dan untuk kelompok Bunga Samudra wajib disetorkan kepada masing-masing rekening tersendiri atas nama masing-masing. Dalam hal ini kelompok Bunga Samudra diberi kepercayaan dan tanggungjawab atas kelancaran penyetoran uang ke masing-masing rekening yang dibuka untuk menampung dana pengguliran. Diharapkan adanya sedikit paksaan untuk menyimpan uang di Bank, akan dapat mengenalkan pola-pola kebiasaan menyimpan uang kepada nelayan. Dengan dikenalnya pola menyimpan uang dalam tabungan, diharapkan secara perlahan dan pasti akan dapat mengubah perilaku nelayan yang terbiasa hidup boros dan tidak suka menabung menjadi terbiasa dengan hidup hemat dan suka menabung.

3.6. Organisasi Pelaksana Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, diperlukan partner kerja di lapangan. Untuk tahap pertama partner kerja dipilih Organisasi Nelayan Bunga Samudra, yang merupakan institusi kerjasama dalam usaha penangkapan ikan dan aktivitas organisasi di darat yang berhubungan dengan penangkapan ikan.

Latar belakang dipilihnya kelompok Bunga Samudra sebagai partner kerja di lapangan didasarkan pada realita lapangan, dimana :

1. Peneliti tidak mungkin dapat terlibat dan mengawasi aktivitas kelompok sasaran setiap saat dibutuhkan. Domisili peneliti yang jauh dari lokasi pemberdayaan hanya memungkinkan dilakukan pendeklegasian pada lembaga yang dipercaya.
2. Kelompok Bunga Samudra sudah terlibat sejak awal, dimulai dari tahap persiapan pemilihan jenis prasarana, pemilihan kelompok sasaran sampai ikut terlibat dalam pengadaan barang yang akan digulirkan.
3. Awak perahu yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah bagian dari *pandega* yang menjadi anggota kelompok Bunga Samudra. Dalam konteks sosiologis *pandega* tersebut merupakan *klien* dari patron yang menjadi anggota kelompok Bunga Samudra. Dengan demikian diantara telah terikat oleh jaringan keakraban yang memungkinkan monitoring dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih enak.

Kerjasama dilakukan tidak dengan perorangan anggota Bunga Samudra, akan tetapi dilakukan dalam konteks institusional yaitu kerjasama dengan organisasi. Fungsi organisasi dalam kerjasama ini

bertindak mewakili peneliti PEP-LIPI yang menjadi penerima dan penyalur peralatan yang diberikan oleh institusi penyandang dana. Selain daripada itu, organisasi ini bertindak atas nama peneliti untuk melakukan monitoring, yang dimaksudkan untuk :

1. Mengawasi kinerja kelompok binaan setiap harinya
2. Mengawasi hasil tangkapan dan hasil penjualan ikan dari kelompok sasaran
3. Mengawasi aliran uang angsuran dari nelayan dan kemudian menyetorkan ke rekening Bank yang telah ditunjuk sebelumnya
4. Bersama-sama dengan tenaga dari Dinas Perikanan Tuban dan dari Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, melakukan pembinaan lebih lanjut kelompok sasaran ke arah institusi sosial ekonomi baru yang mungkin akan dibentuk untuk mengatasi kendala-kendala yang umumnya dihadapi nelayan

Kerjasama dengan kelompok Bunga Samudra diharapkan akan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Bilamana kerjasama dapat berjalan lancar, maka dapat dilakukan ekspansi pengguliran kepada kelompok nelayan yang lain seiring dengan lancarnya pengembalian dana dari kelompok sasaran. Semakin berkembangnya kelompok nelayan yang akan menerima guliran, menyebabkan akan semakin bertambah kelompok yang menjadi pemilik peralatan penangkapan ikan. Dengan demikian pola yang dikembangkan ini akan dapat memperbesar jumlah nelayan yang memiliki sarana penangkapan ikan, atau kelompok *juragan darat*.

Semakin banyaknya kelompok *juragan darat*, serta melalui sistem bagi hasil yang umum berlaku di kalangan nelayan, maka akumulasi modal akan terjadi pada kelompok juragan darat yang lebih besar jumlahnya. Artinya, akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih banyak pada nelayan, dan secara keseluruhan perekonomian nelayan akan menjadi semakin baik. Dengan demikian mobilitas sosial ke atas akan terjadi pada kelompok nelayan yang lebih luas.

Apabila kelompok sasaran yang menjadi binaan pertama kali telah melunasi angsuran kredit yang diterimanya, kelompok tersebut merupakan kelompok kerja yang telah mandiri, bermodal, dan diharapkan dapat mengembangkan usahanya. Meskipun demikian, diharapkan kelompok ini tetap masih terkait dengan organisasi dalam rangka pembinaan lebih lanjut dalam usaha. Pada tahapan seperti inilah kerjasama dengan Organisasi Bunga Samudra kemungkinan kurang relevan lagi sebagai institusi yang perlu melakukan ekspansi usaha. Pada tahapan seperti ini akan dibentuk sebuah Yayasan, selain

untuk melanjutkan fungsi¹ Organisasi Bunga Samudra maka yayasan akan melakukan ekspansi usaha kepada tahapan yang lebih banyak dapat memberi nilai keuntungan pada nelayan secara lebih banyak.

Yayasan akan dibentuk sebagai wadah kegiatan yang bergerak dalam bidang pengembangan institusi sosial ekonomi baru, dan sebagai wadah yang menaungi semua kelompok-kelompok binaan yang terbentuk dalam kaitannya dengan usaha penangkapan ikan di laut maupun dalam aspek pemasaran produknya. Pada tahapan ini yayasan akan membentuk institusi kerjasama "dana darurat" yang diharapkan akan dapat beroperasi sebagai unit simpan pinjam. Modal dikumpulkan terutama dari dana cadangan perbaikan yang besarnya sekitar ½ bagian dari hasil tangkapan setiap melaut. Kelembagaan "dana darurat" diharapkan akan dapat membantu nelayan memecahkan permasalahan-permasalahan seperti :

- Pengadaan perbekalan pada setiap kali melaut, sehingga nelayan tidak perlu terjerat hutang pada tengkulak atau bakul ikan.
- Sebagai tempat yang dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sewaktu masa "paceklik", sehingga nelayan tidak perlu terjerat dalam ikatan hutang yang memberatkan kehidupan.
- Sebagai sarana yang dapat mengembangkan wawasan dan pendidikan nelayan untuk berlaku hemat serta membiasakan diri menabung.

3.7. Manfaat Ekonomi Dari Pemberdayaan

Masalah lain yang perlu diungkap sampai sejauh ini adalah seberapa besar manfaat ekonomi dari pemberdayaan ini? Apakah betul bahwa dengan model pemberdayaan yang diterapkan ini, pendapatan nelayan menjadi meningkat? Lebih jauh lagi, apakah dengan pembudayaan ini pemerataan dapat terjadi?

Sebagaimana yang telah diuraikan, prinsip dasar dari pemberdayaan ini adalah pengembangan pemilikan kelompok dan penerapan bagi hasil sesuai dengan tradisi yang berlaku. Hanya perbedaannya adalah bagi hasil yang secara tradisi dianut oleh nelayan setempat, seperangkat alat produksi tetap dimiliki oleh pemilik modal (*juragan darat*), sedangkan dalam pemberdayaan ini kelompok nelayan suatu saat akan berhak memiliki alat produksi tersebut setelah melunasi angsuran. Seperti yang telah diuraikan pula bahwa, yang menjadi hak *juragan darat* atas hasil tangkapan adalah seboro bagian ditambah dengan cadangan perbaikan alat produksi, sedangkan sisanya dibagi di antara *pandega* sesuai fungsi awak tersebut di

perahu. Sekali lagi, apakah dengan pemberdayaan ini pendapatan nelayan menjadi meningkat? Sebagai ilustrasi akan diuraikan proporsi pendapatan nelayan menurut tradisi yang berlaku dengan alat tangkap srool dibandingkan dengan pola pemberdayaan yang dilakukan oleh PEP – LIPI.

Menurut tradisi daerah setempat, nilai ikan hasil tangkapan nelayan (*raman kotor*) dipotong $2 \frac{1}{2}$ % untuk retribusi pelelangan², dikeluarkan untuk perbekalan perahu seperti untuk bahan bakar dan sisanya dibagi antara pemilik dan awak penangkap ikan. Bagi hasil di antara awak tergantung dari fungsi awak tersebut di perahu. Akan tetapi yang terbesar akan diperoleh jurumudi (*tekong*) yang bertindak selaku nakhoda dalam penangkapan. Hasil penelitian PEP-LIPI (1998 dan 1999), pendapatan kotor (*raman*) nelayan *Srool* dalam sekali melaut berkisar Rp. 450.000,-. Dari pendapatan tersebut maka distribusi pembagian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Pendapatan Nelayan *Srool*

Produksi	
Raman kotor	Rp. 450.000,-
Pengeluaran bersama:	
1. Biaya lelang $2 \frac{1}{2}$ %	Rp. 11.250,-
2. Perbekalan (rata-rata)	Rp. 10.000,-
	Rp. 21.250,-
Raman bersih	Rp. 428.750,-
Dibagi 9 bagian :	
1. Awak 4 bagian (4 orang)	Rp. 190.556,-
2. Juragan $3 \frac{1}{4}$ bagian	Rp. 154.826,-
3. Cadangan perbaikan 1 bagian	Rp. 47.639,-
4. Hak jurumudi $\frac{1}{4}$ bagian	Rp. 23.819,-
5. Hak sebagai bunt $\frac{1}{4}$ bagian	Rp. 11.910,-

Hak yang menjadi milik juragan darat adalah bagian dari hasil bagi sebagai juragan sebesar $3 \frac{1}{4}$ bagian ditambah dengan cadangan perbaikan perahu, jaring dan mesin sebesar 1 bagian. Dengan demikian yang menjadi hak juragan darat adalah sebesar $4 \frac{1}{4}$ bagian,

² Retribusi lelang ikan sebenarnya 5 %, tetapi $2 \frac{1}{2}$ % dilarik dari nelayan sedangkan $2 \frac{1}{2}$ % sisanya dari pembeli ikan.

atau Rp. 202.465,-. Adapun yang menjadi hak awak perahu adalah bagi hasil sebagai awak dibagi dengan jumlah awak yang terlibat dalam penangkapan. Oleh karena biasanya awak perahu Srool berjumlah 4 orang maka, rata-rata setiap awak akan menerima bagian Rp. 47.639. Apabila fungsinya diperahu adalah juga sebagai jurumudi, maka haknya ditambah dengan hak sebagai jurumudi sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Demikian pula jika fungsi awak dalam penangkapan tersebut sebagai *burit* maka haknya ditambah dengan hak sebagai burit sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.

Model yang dikembangkan oleh PEP-LIPI adalah, hak juragan darat sebesar $4 \frac{1}{4}$ bagian (Rp. 202.465,-) dianggap sebagai angsuran kelompok. Selama masa angsuran maka fungsi LIPI akan berperan sebagai juragan darat. Pendapatan nelayan selama angsuran secara riil tidak berbeda dengan buruh nelayan yang bekerja pada juragan pemilik srool setempat. Akan tetapi, sebenarnya nelayan tersebut telah berpendapatan plus, yakni plus angsuran untuk pelunasan sarana penangkapan yang mereka operasikan.

Apabila angsuran tersebut telah lunas, pendapatan plus tersebut secara riil akan di terima nelayan secara langsung. Mengingat seperangkat unit penangkapan yang mereka gunakan adalah milik bersama, secara bersama-sama pula mereka menjadi juragan dari perahu tersebut. Secara bersama-sama pula mereka berhak menerima bagian juragan secara merata. Dengan demikian, pemerataan pembagian pendapatan makin terjadi diantara mereka. Selain itu, pendapatan mereka pun meningkat, yakni pendapatan yang mereka terima karena ia bekerja, sebagai pandega, jurit, atau jurumudi, dan pendapatan plus yang mereka terima karena ia pemilik perahu. Pendapatan yang meningkat memungkinkan terjadinya surplus. Apabila demikian, ini berarti proses akumulasi sedang berlangsung, yang pada gilirannya mendorong terjadinya mobilitas vertikal nelayan.



BAB IV

POLA KELOMPOK DAN PROSPEKNYA

L I P I

BAB IV

POLA KELOMPOK DAN PROSPEKNYA

Penelitian uji model pemberdayaan nelayan tertinggal yang dilakukan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, merupakan rangkaian kajian terhadap strategi pengembangan masyarakat nelayan tertinggal. Sebagai rangkaian kajian strategis, diharapkan ada kontinuitas pengamatan terhadap model pemberdayaan yang diujicobakan pada kelompok sasaran.

Menurut Rahnema (1995 :178-179) dalam intervensi program diperlukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat, pendekatan partisipatif dalam *Partisipatory Action Research* membutuhkan jangka waktu yang lama dan pengamatan yang kontinyu untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Permasalahan dalam kajian yang diintroduksikan pada masyarakat desa Kradenan, Kecamatan Palang Tuban adalah, adanya batasan-batasan administratif sesuai dengan kalender anggaran proyek menyebabkan pengamatan tidak mungkin dilakukan secara kontinyu melebihi jangka waktu anggaran proyek. Padahal dalam program uji model pemberdayaan masyarakat nelayan miskin ini dilakukan intervensi pemberian bantuan guliran berupa seperangkat alat tangkap ikan. Untuk alasan ketepatan pengembalian kredit serta mengetahui permasalahan dan hambatan yang dialami nelayan sasaran diperlukan pengamatan dan monitoring secara rutin dan teratur. Guna menjamin kontinuitas program diperlukan suatu organisasi pelaksana program di tingkat lapangan, yang dapat mengakomodasi antara kepentingan perencanaan dengan realita yang ada di lapangan. Oleh karena itu tim berusaha merancang suatu kelembagaan di tingkat lokal sebagai kepanjangan tangan peneliti untuk memonitor, mengatur keuangan kelompok sasaran serta memecahkan persoalan jangka pendek sebelum diputuskan oleh tim peneliti.

Diharapkan akan dapat dibentuk tiga (3) kelembagaan yang muncul dari pola pemberdayaan yang dilakukan oleh PEP-LIPI, yaitu :

1. Kelembagaan kelompok kerja (*informal*), yaitu kelompok atau unit organisasi penangkapan ikan yang masing-masing anggotanya mempunyai saham atas prasarana produksi yang dioperasikan.

2. Kelembagaan “dana darurat” yang berperan terutama untuk mengatasi kesulitas pengadaan perbekalan melaut, dan pemenuhan kebutuhan nelayan khususnya pada waktu “paceklik”.
3. Kelembagaan yang berbentuk yayasan. Lembaga ini bersifat formal dan berfungsi sebagai institusi yang menjembatani komunitas nelayan setempat dengan dunia luar.

4.1. Kerangka Kelembagaan

4.1.1. Kelembagaan Kelompok Kerja

Kelompok kerja yang akan dapat dibentuk dari pola model pemberdayaan PEP-LIPI adalah kelompok kerja yang “setara” karena seluruh awak perahu (*padega*) juga berfungsi sebagai juragan.

Kesetaraan ini dikarenakan masing-masing anggota dalam kelompok kerja mempunyai saham atas prasarana produksi yang dioperasikan. Pola ini mengacu pada kebiasaan masyarakat nelayan di beberapa daerah (Bulu- Tuban, Mlaten Pasuruan dan sebagainya) dalam menanggulangi masalah kesulitan modal. Mereka melakukan kerjasama dalam investasi sarana penangkapan. Sistem pemilikan kolektif (capital sharing) atas prasarana produksi memberi kesempatan yang lebih besar terjadi pemerataan pendapatan. Hal ini dilitar belakangi oleh kebiasaan nelayan yang melakukan pola bagi hasil atas tangkapannya.

Sebagaimana yang telah diterangkan di depan, dalam pola bagi hasil, separo dari hasil bersih tangkapan menjadi bagian juragan sebagai pemilik prasarana alat tangkap. Separo lainnya menjadi bagian *padega* (awak kapal). Bagian pandega tersebut dibagi berdasarkan porsi keterlibatannya secara khusus sebagai awak, dan jumlah awak yang terlibat dalam penangkapan. Semakin banyak jumlah awak yang terlibat, semakin kecil persentase yang diterima setiap awak (*pandega*). Akan tetapi pola bagi hasil dalam sistem pemilikan kolektif memungkinkan bagian juragan di bagi berdasarkan persentase kepemilikan saham. Demikian pula dengan pola LIPI yang mengintrodusir bahwa saham prasarana alat tangkap tersebut dimiliki oleh para pandega yang juga menjadi awaknya. Maka para pandega tersebut selain akan mendapatkan bagian sebagai awak perahu sesuai porsinya dalam penangkapan, juga akan mendapatkan bagian sebagai salah satu pemilik prasarana produksi.

Selain itu pola ini memungkinkan para padega mempunyai *bargaining position* yang cukup kuat dalam menghadapi tengkulak. Biasanya yang berperanan penting dalam menjual ikan hasil tangkapan adalah para juragan. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PEP-

Lipi (1999) di Karang Agung-Tuban menunjukkan, peranan istri juragan sangat penting dalam menjual ikan. Seringkali harga jual yang ditetapkan untuk nelayan lebih kecil dari pada riil yang dijual ke tengkulak. Praktek semacam ini memungkinkan juragan masih mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual ke *pandega* ditambah dengan sistem bagi hasil yang berlaku. Sebaliknya mengacu pada sistem pemilikan kolektif, para *pandega* yang juga sebagai pemilik prasarana produksi akan mempunyai kekuatan tawar-menawar. Mereka berhak tidak menjual ikan hasil tangkapannya jika dianggap tidak layak. Di Bulu (Tuban) *pandega* yang paling muda diberi peranan yang paling penting dalam *bargaining position* dengan pedagang ikan.

Dengan demikian kelembagaan kelompok kerja ini diharapkan dapat berperan dalam mengatasi berbagai masalah interen, yaitu :

- Masalah penangkapan ikan
- Penanganan produksi pasca tangkap, yang memungkinkan terjadinya pemerataan pembagian pendapatan diantara nelayan awak.
- Penanganan dalam pemasaran ikan, yang memungkinkan nelayan tidak dieksplorasi oleh pihak lain terutama tengkulak, juragan atau perantara.

4.1.2. Kelembagaan “ Dana Darurat”

Usaha penangkapan ikan merupakan usaha yang padat modal, terutama untuk pengadaan perahu, jaring, mesin, perahu ataupun biaya operasi. Meskipun demikian lembaga keuangan formal, seperti bank, masih sangat terbatas memberi kredit kepada nelayan.

Penelitian yang dilakukan PEP – LIPI (1998 dan 1999) di beberapa komunitas nelayan (Kedung Malang – Jepara, Karang Agung, Kradenan – Tuban, Nguling, Mlaten-Pasuruan, Labuhan Maringgai, Sukajaya Lempassing-Lampung) menunjukkan sumber permodalan nelayan banyak diperoleh dari pelepas uang. Sangat berperannya para pelepas uang pada sub sektor penangkapan ikan disebabkan antara lain tidak berperannya kredit dari instansi perbankan. Alasan utamanya adalah nelayan tidak mempunyai pendapatan yang pasti, dan usaha penangkapan ikan sarat dengan risiko. Sehingga diperkirakan nelayan akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kredit yang diterima. Hasil penelitian di Lampung (Nadjib, 1998 : 53-54) menunjukkan institusi pemberi kredit formal tidak bersedia melayani pemberian kredit untuk nelayan dengan alasan sifat usahanya yang berisiko tinggi.

Kalaupun memberi kredit harus meninggalkan agunan berupa barang-barang berharga yang tidak banyak mengandung risiko seperti sertifikat rumah.

Selama ini nelayan mengembangkan tata hubungan mutualisme dengan tengkulak. Pada masa pacaklik nelayan sering melakukan pertolongan ekonomi, ini dapat diperoleh dari tengkulak yang bertindak selaku *patron*. Imbalan yang harus diberikan nelayan adalah harus menjual ikan hasil tangkapan kepada *patron*. Biasanya harga yang ditetapkan sangat tidak elastis, nelayan senantiasa dalam posisi yang lemah. Di berberapa daerah (Teluk Lampung, Labuan Maringgai, Pasuruan, Jepara dan juga Tuban) jenis-jenis ikan komersial yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti udang dan teri nasi yang biasanya menjadi sarana cengkraman tengkulak. Untuk meningkatkan kepuasan nelayan agar menjual hasil tangkapannya, tengkulak senantiasa memberikan ikatan berupa hutang yang tidak pernah ditagih, bahkan kadangkala hutang tersebut menjadi berlipat ganda yang sulit untuk membayarnya. Yang terjadi adalah nelayan dieksplorasi tenaganya untuk keuntungan engkulak.

Model kelembagaan "dana darurat" terutama berperan untuk mengatasi kesulitan pengadaan perbekalan melaut, dan juga memenuhi kebutuhan nelayan khususnya waktu "pacaklik". Kelembagaan ini diharapkan, nelayan kecil yang miskin berangsurgansur dapat terbebas dari jeratan hutang dari para pelepas uang. Pada tahap awal "dana darurat" akan bersifat informal, tetapi tidaklah mustahil bilamana lembaga ini menjadi kuat akan dapat menjadi lembaga yang berbadan hukum.

4.1.3. Kelembagaan yang Berbentuk Yayasan

Yayasan merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai penghubung antara komunitas nelayan setempat dengan dunia luar.

Tahap awal, yayasan akan didirikan oleh PEP – LIPI sebagai penyandang dana dalam pemberdayaan nelayan setempat. Dibentuknya yayasan ini dengan latar belakang bahwa uji model yang dikembangkan mendapatkan dana dari anggaran proyek. Sebagai suatu proyek, maka ada batasan-batasan administrasi sesuai dengan tahun kalender berjalan sehingga pengamatan dan pendampingan tidak dapat dilakukan kontinyu melebihi tahun anggaran yang ditentukan. Sebagaimana yang diulas Rahmena (1995) bahwa intervensi program diperlukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat sasaran serta pengamatan yang kontinyu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam uji model ini dilakukan intervensi pemberian bantuan guliran

yang terdiri dari seperangkat alat tangkap ikan. Agar supaya perangkat alat tangkap yang digulirkan dan perkembangan nelayan yang mendapatkan guliran dapat dimonitor, maka yayasan ini didirikan. Melalui kelembagaan yayasan, monitoring tidak hanya terbatas dalam kurun waktu berjalannya proyek, tetapi dapat dilakukan melampaui batas-batas administrasi.

Diharapkan dana tidak hanya bergulir pada satu kelompok saja, akan tetapi dapat berkembang kepada kelompok *blah tompo* yang lain. Fungsi yayasan tetap sebagai pengelola administrasi dana guliran serta pengelola unit "dana darurat" bagi kebutuhan nelayan setempat. Dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan yayasan dapat menjadi semacam pengelola beberapa perahu yang *gulirannya* dilakukan melalui yayasan. Kalau yayasan dapat mandiri, dengan mengelola sisa dari cadangan perbaikan perahu yang tidak terpakai maka pengembangan yayasan diharapkan dapat menjangkau aktivitas sosial. Contoh semacam ini terdapat di Gudang Lelang (Lampung), komunitas nelayan setempat dapat dikatakan sebagai nelayan yang sukses. Oleh karena kesuksesannya, masyarakat setempat mampu mendirikan yayasan pendidikan yang cukup representatif dengan gedung bertingkat. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak nelayan dengan nama Yayasan Pendidikan Anak Nelayan.

Pengelola yayasan dipilih dari tenaga setempat, sedapat mungkin pengurus adalah orang yang disegani oleh nelayan umumnya serta menjadi *patron* dari para *blah* yang mendapatkan guliran. Hubungan *patronage* dalam komunitas nelayan sudah sangat mengakar, sehingga sulit melakukan intervensi tanpa melibatkan *patron* yang ada. Mereka yang dilibatkan dalam pengelolaan yayasan adalah para pemilik perahu yang mempunyai posisi penting dalam Organisasi Bunga Samudra. Mereka inilah yang dilibatkan dalam pembentukan kelompok sasaran, mengawasi hasil tangkapan nelayan dan mengorganisasi angsuran nelayan ke Bank serta menjadi mediator antara peneliti dengan kelompok sasaran.

4.2. Estimasi Pengembalian Kredit

Pengembalian kredit dilakukan melalui "sistem bagi hasil" yang telah menjadi tradisi di kalangan nelayan. Dengan sistem ini nelayan tidak perlu memikirkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Nelayan dapat bekerja sebagaimana biasanya, mendapatkan penghasilan sebagaimana adanya, dan sarana penangkapan yang digunakan suatu waktu akan menjadi hak milik kelompoknya tanpa di sadarinya.

Nelayan akan secara otomatis mengembalikan angsuran kredit setiap kali melaut. Nelayan akan mengangsur pinjamannya dari bagian yang menjadi hak juragan darat sebagai pemilik peralatan. Oleh karena itu banyak sedikitnya jumlah angsuran tergantung dari besar kecilnya perolehan hasil tangkapan. Semakin besar hasil tangkapan nelayan, makin besar pula angsuran yang dibayarkan. Menurut tradisi setempat, sistem bagi hasil untuk perahu *srool* (*dogolan*) adalah hasil bersih (hasil *raman kotor* dikurangi uang tengah untuk operasional perahu) dibagi menjadi delapan (8) bagian. Dalam uji model pemberdayaan yang dilakukan PEP-LIPI maka hasil bersih secara musyawarah dibagi menjadi sembilan (9) bagian, yaitu :

- a. Empat (4) bagian menjadi hak awak perahu
- b. Empat (4) bagian menjadi hak *juragan darat*.
- c. Satu (1) bagian untuk cadangan perbaikan dan operasional kerja PEP-LIPI dan Bunga Samudra.

Hasil bagi untuk *juragan darat* dikeluarkan untuk :

- a. Seperempat ($\frac{1}{4}$) dari satu (1) bagian untuk *burit*.
- b. Setengah ($\frac{1}{2}$) dari satu (1) bagian untuk *tekong* (*jurumudi*).

Pemberi kredit (PEP-LIPI) untuk sementara sampai angsuran lunas berperan sebagai *juragan darat*, akan menerima sebanyak $3\frac{1}{4}$ bagian dari hasil bersih. Bagian itulah yang menjadi angsuran nelayan kepada pemberi kredit. Jangka waktu pelunasan kredit disadari tidak akan sama antara satu kelompok nelayan dengan kelompok nelayan yang lain. Semuanya akan tergantung pada jumlah hasil tangkapan setiap kali melaut dan tentu saja nilai jual ikan yang ditangkap setiap kali melaut. Dalam hal ini estimasi pengembalian kredit dihitung berdasarkan patokan pendapatan dari hasil penelitian tim di lapangan pada tahun 1997 dan 1998.

Dalam setahun rata-rata nelayan melaut sebanyak 200 kali. Musim panen ikan dalam setahun berlangsung kurang lebih 3 bulan (sekitar 50 kali melaut). Pada musim banyak ikan biasanya nelayan mengalami beberapa kali *along*, yaitu mendapat hasil tangkapan banyak atau kadangkala juga mengalami masa *laib* yang merupakan masa paceklik bagi nelayan. Pada tahun 1998 tersebut terjadi peningkatan nilai ikan yang ditangkap nelayan. Peningkatan nilai ikan yang ditangkap nelayan tersebut bukan disebabkan oleh jumlah hasil tangkapan nelayan yang meningkat, bahkan ada kecenderungan jumlah hasil tangkapan menunjukkan relatif sama. Akan tetapi dikarenakan oleh nilai jual ikan yang semakin meningkat. Hasil tangkapan dengan perahu *srool* dalam sekali melaut minimal dapat

dijual dengan harga Rp 150.000,- bahkan bilamana kondisi sedang *along* dapat memperoleh hasil sekitar Rp 750.000,-. Tingginya nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan pada waktu itu dipicu oleh adanya depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar Amerika. Korelasi tersebut dikarenakan bahwa komoditas unggulan nelayan Tuban pada umumnya adalah ikan yang dieksport yaitu jenis teri nasi dan udang. Dengan demikian ikan yang dieksport tersebut nilai rupiahnya menjadi semakin meningkat. Selain dari itu ada dugaan pada waktu krisis ekonomi banyak konsumen daging beralih mengkonsumsi jenis ikan. Ini dikarenakan peternakan di Indonesia cenderung banyak mempergunakan komponen barang yang tinggi kandungan impomnya seperti pakan, obat-obatan dan bakalan ternak. Akibatnya harga daging di Indonesia cenderung semakin meningkat pesat, sehingga sulit dijangkau oleh daya beli kebanyakan penduduk. Hal ini menjadikan konsumen daging cenderung beralih mengkonsumsi ikan, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Dengan demikian semakin banyaknya permintaan konsumen menjadikan harga ikan non eksport terangkat pula.

Pada waktu krisis ekonomi tersebut terjadi "boom" peningkatan ekonomi masyarakat nelayan. Beberapa kelompok nelayan mencatat perbaikan cukup berarti dalam tingkat pendapatannya. Perbedaan harga sangat tajam terjadi pada komoditas eksport, harga udang laut ukuran 40 inci di Kedung Malang, Jepara yang semula Rp 30.000,-/kg sewaktu krisis mencapai harga Rp 110.000,-/kg. Pada waktu itu desa Kedung Malang yang termasuk kategori desa pra sejahtera penduduknya mengembalikan bantuan beras program Jaring pengaman Sosial. Demikian pula dengan nelayan desa Kradenan, Tuban. Harga teri nasi yang semula paling tinggi Rp 7000,-/kg, pada waktu krisis telah mencapai harga tidak kurang dari Rp 20.000,-/kg. Peningkatan pendapatan nelayan yang sangat tajam dapat diketahui dari banyaknya nelayan yang melakukan renovasi rumah atau membeli barang-barang konsumsi seperti benda elektronik. Nilai hasil tangkapan nelayan pada waktu itulah yang dipakai sebagai pegangan tim untuk mengestimasikan jangka waktu pengembalian pinjaman nelayan.

Estimasi periode pengembalian (*pay back periods*) untuk sebuah perahu *Srool* dengan modal guliran yang ditanam PEP-LIPI sebanyak Rp 27,100.000,-, adalah :

Estimasi I :

Pendapatan *taib*, perkiraan pendapatan Rp 150.000,-

Pengeluaran Perahu :

1. Biaya lelang 2 ½ %	Rp 3.750,-
2. Perbekalan (rata-rata)	<u>Rp 10.000,-</u>
	Rp 13.750,-

Raman bersih = Rp 150.000,- - Rp 13.750,- = Rp 136.250,-

Hasil *raman bersih* dibagi menjadi sembilan (9) bagian yang menjadi hak *juragan darat*, seluruh awak perahu dan cadangan perbaikan. Distribusi pembagian dari *raman bersih* adalah :

1. Total hak awak perahu 4 bagian	= Rp 60.555,-
2. Hak <i>juragan darat</i> 3 ¼ bagian	= Rp 49.200,-
3. Untuk Cadangan Perbaikan	= Rp 15.138,-
4. <i>Burit</i>	= Rp 3.784,-
5. <i>Tekong</i> (jurumudi)	= Rp 7.569,-

Estimasi II :

Pendapatan *along*, perkiraan pendapatan Rp 750.000,-

Pengeluaran Perahu :

1. Biaya lelang 2 ½ %	Rp 18.750,-
2. Perbekalan (rata-rata)	<u>Rp 10.000,-</u>
	Rp 28.750,-

Raman Bersih = Rp 750.000,- - Rp 28.750,- = Rp 721.250,-

Hasil *Raman bersih* dibagi menjadi sembilan (9) bagian yang menjadi hak *juragan darat*, seluruh awak perahu dan cadangan perbaikan. Distribusi pembagian dari *raman bersih* adalah :

1. Total hak awak perahu 4 bagian	= Rp 320.555,-
2. Hak <i>Juragan darat</i> 3 ¼ bagian	= Rp 260.451,-
3. Untuk Cadangan Perbaikan	= Rp 80.138,-
4. <i>Burit</i>	= Rp 20.034,-
5. <i>Tekong</i> (jurumudi)	= Rp 40.069,-

Estimasi III :

Pendapatan rata-rata, pendapatan sekitar Rp 450.000,-

Pengeluaran Perahu :

1. Biaya lelang 2 ½ %	= Rp 11.250,-
2. Perbekalan (rata-rata)	= Rp 10.000,-
	Rp 21.250,-

$$\text{Raman Bersih} = \text{Rp } 450.000,- - \text{Rp } 21.250,- = \text{Rp } 428.750,-$$

Hasil *raman bersih* dibagi menjadi sembilan (9) bagian yang menjadi hak *juragan darat*, seluruh awak perahu dan cadangan perbaikan. Distribusi pembagian dari *raman bersih* adalah :

1. Hak seluruh awak perahu 4 bagian	= Rp 190.555,-
2. Hak <i>juragan darat</i> 3 ¼ bagian	= Rp 154.826,-
3. Untuk Cadangan Perbaikan	= Rp 47.638,-
4. <i>Burit</i>	= Rp 11.909,-
5. <i>Tekong (jurumudi)</i>	= Rp 23.819,-

Bilamana digunakan perkiraan III dari hasil tangkapan nelayan, maka periode pengembalian nelayan diestimasikan sebagai berikut:

Total Guliran

Bagian Juragan darat

$$\underline{\underline{26.700.000,-}} = \pm 172$$

$$154.826$$

Diperkirakan sekitar 172 kali melaut nelayan akan dapat melunasi angsuran kreditnya atau dalam jangka waktu sekitar 10 bulan.

4.3. Hambatan Pemberdayaan

Aplikasi suatu program betapapun baiknya program tersebut, tidak dapat berhasil baik apabila hambatan-hambatan yang ada di lapangan tidak dapat terpecahkan. Karenanya, pemahaman terhadap hambatan yang ada dan bagaimana pemecahannya merupakan hal yang penting dalam pemberdayaan.

Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, antara lain :

- a. Dominasi juragan darat atas nelayan ABK
- b. Pandangan nelayan terhadap paket-paket bantuan pemerintah
- c. Pembentukan kelopok sasaran (*target group*)

Berikut ini adalah uraian terhadap hal-hal tersebut yang dianggap sebagai hambatan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

Realitas sosial yang sementara susah dihilangkan, dan diketemukan dihampir semua masyarakat nelayan adalah keterkaitan nelayan buruh kepada juragan. Mereka umumnya terikat hutang pada juragan pemilik sarana penangkapan ikan. Hutang-hutang tersebut merupakan akumulasi dari kegiatan, seperti biaya operasional yang harus ditanggung pada waktu-waktu tidak memperoleh tangkapan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari bila kebetulan masa "paceklik", atau kebutuhan-kebutuhan hajatan, sunatan, pesta perkawinan, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti ini juragan senantiasa menyediakan diri sebagai "pemberi" dana. Dilain pihak, juragan sendiri senantiasa ingin mengikat nelayan buruh dengan utang, apapun caranya. Dengan cara itu, juragan setiap saat dapat memerintahkan nelayan buruh untuk melaut. Nelayan yang telah terikat hutang kepada juragan tertentu disebut sebagai ABK juragan yang dimaksud. Di daerah-daerah komunitas nelayan di Tuban, hutang setiap nelayan buruh pada juragan pada waktu penelitian dilakukan (tahun 1997 dan 1998) mencapai sekitar Rp.750.000,-.

Nelayan buruh yang terikat hutang kepada juragan tertentu tidak dapat berpindah begitu saja kepada juragan lain. Mereka baru dapat pindah juragan apabila hutang yang ada telah dibayar lunas. Nelayan buruh biasanya tidak pernah berfikir melunasi hutang-hutang mereka, kecuali ada alasan yang sangat luar biasa. Sementara juragan juga tidak menuntut pembayaran atas hutang tersebut selama mereka tetap bekerja padanya.

Seorang juragan baru, atau seorang juragan yang baru saja meluncurkan perahu baru, perlu mengeluarkan dana ekstra. Untuk memperoleh anak buah kapal untuk mengoperasikan perahunya. Mereka harus membayar lunas hutang-hutang nelayan buruh yang direkrutnya kepada juragan sebelumnya.

Pemberdayaan nelayan dengan sistem pemberian modal guliran kepada nelayan, khususnya nelayan buruh, secara otomatis akan menghadapi kendala tersebut. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, unit organisasi baru harus dibentuk, dan ini berarti harus merekrut ABK. Beruntung bila ada seorang nelayan, yang

sebelumnya meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan bekerja di sektor lain, kembali untuk bekerja sebagai nelayan. Nelayan seperti ini belum atau tidak terkait hutang kepada juragan manapun karena sebelumnya mereka telah melunasi hutang-hutang mereka ketika beralih pekerjaan.

Untuk mengatasi hal ini, program-program pemberdayaan nelayan perlu melibatkan juragan setempat, terutama juragan-juragan yang berpengaruh. Mereka dapat difungsikan sebagai penghubung, dilibatkan dalam pengelolaan perahu, dan juga sebagai pengawas pelaksana program pemberdayaan. Dengan demikian hambatan yang muncul, atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu pembentukan kelompok sasaran dapat lebih mudah teratasi.

Kendala kedua adalah pandangan yang kurang menguntungkan dari nelayan terhadap program-program yang dibiayai oleh Pemerintah. Pandangan yang negatif yang terbentuk terhadap hal ini adalah bahwa yang disebut bantuan itu berarti diberikan. Meskipun mereka terikat perjanjian bahwa bantuan yang diterimanya tersebut merupakan modal pinjaman, dan harus mereka bayar kembali, mereka beranggapan bahwa yang demikian itu tidak mengikat. Pengalaman program-propgram bantuan pemerintah sebelumnya yang mereka harus membayar kembali, tetapi tidak dilakukan, tidak ada penyelesaian yang jelas. Semuanya dianggap selesai bila dinyatakan bahwa program tersebut telah gagal.

Hal yang paling memberatkan bagi nelayan adalah apabila nelayan tersebut harus mengangsur secara teratur dengan jumlah yang pasti. Seperti mengangsur setiap bulan dengan jumlah uang yang ditetapkan. Kultur dan prilaku nelayan kurang cocok untuk hal-hal yang seperti ini, khususnya nelayan-nelayan yang kehidupannya masih pada tingkat subsisten. Pendapatan mereka yang tidak teratur menciptakan pola pikir yang agak labil.

Suatu langkah yang perlu dilakukan berkenaan dengan ini adalah menerapkan sistem penarikan kembali dana yang diinvestasikan yang sesuai dengan tradisi mereka. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan nelayan di Tuban ini, sistem pengembalian kredit yang diberikan kepada nelayan dilakukan atas dasar "sistem bagi hasil". Dalam konteks ini, bagian yang harus diserahkan kepada juragan, diperhitungkan sebagai angsuran. Sementara pelaksana program pemberdayaan untuk sementara berstatus sebagai "juragan".

Kendala ketiga ada kaitannya dengan pandangan nelayan di atas. Karena segala bentuk program-program paket bantuan dipandang sebagai "yang gratis", maka ikatan keluarga menjadi penting. Orang-orang, atau nelayan setempat yang kebetulan terikat

dalam program pemberdayaan berusaha keras untuk menempatkan anggota keluarga, atau orang-orang yang mempunyai hubungan famili di sebagai anggota sasaran. Bila kurang hati-hati kelompok sasaran yang dibentuk bisa hanya terdiri dari satu keluarga.

Pengalaman di Kradenan dalam pelaksanaan pemberdayaan ini membuktikan hal tersebut. Kelompok sasaran yang terbentuk pada mulanya benar-benar terdiri dari nelayan-nelayan dari satu keluarga. Untungnya hal ini belakangan dapat terungkap, sehingga perlu dilakukan pembentukan kelompok sasaran yang baru. Hal penting yang perlu diperhatikan apabila hal tersebut terjadi adalah jangan sampai pelaksana program yang membubarkan kelompok sasaran yang telah terbentuk sebelumnya. Perlu dilakukan diskusi terbuka, dan memancing permasalahan tersebut muncul dalam diskusi, usahakan muncul pro dan kontra diantara mereka. Bila demikian, pada akhirnya mereka sendiri yang membatalkannya.

Kelompok penangkapan ikan perlu kekompakan penuh, tidak saja pada waktu penangkapan ikan, tetapi juga pada waktu pasca penangkapan, dan perawatan sarana penangkapan ikan yang digunakan. Semua ini merupakan pekerjaan berat dan perlu kerjasama yang baik-baik. Bila terjadi tidak keserasian diantara mereka kelompok kerja ini bisa dipastikan akan bubar. Bila demikian, sarana produksi yang ada diterlantarkan begitu saja, atau bahkan sengaja dirusak. Hal yang ideal barangkali, pembentukan kelompok kerja diharapkan akan berhasil baik bila didasarkan kelompok-kelompok kerja yang terjalin diantara mereka secara alamiah.

4.4. Pemberdayaan dan Kendala Laten

Nelayan tradisional dewasa ini masih menghadapi banyak kendala yang bersifat struktural. Diantaranya yang masih dibicarakan adalah struktur pasar yang tercipta dalam pemasaran ikan, sumber permodalan, dan tingkat pendidikan. Permasalahan yang muncul adalah apakah model pemberdayaan yang dikembangkan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut? Selama ini nelayan dianggap kurang mampunya akses terhadap pasar, lembaga keuangan resmi, dan rendahnya pendidikan di kalangan mereka. Apakah dengan model pemberdayaan tersebut dapat membuka akses-akses yang dimaksud untuk nelayan?

4.4.1. Pemasaran Ikan

Bisa dikatakan bahwa nelayan hampir-hampir tidak memiliki jalan masuk kepada pasar. Pemasaran ikan hasil tangkapan senantiasa

melalui perantara. Mereka hampir-hampir tidak dapat menjual ikan mereka kecuali melalui perantara tersebut. Dalam transaksi yang terjadi dengan perantara, nelayan senantiasa tidak memiliki kekuatan tawar menawar.

Berdasarkan data-data lapangan, setidak-tidaknya terdapat tiga pola pemasaran ikan yang berbeda (Masyhuri, 1998 : 67-68). Pertama adalah pola perdagangan ikan yang mempunyai nilai tinggi. Pola perdagangan ini adalah pola perdagangan yang terkait langsung dengan jaringan perdagangan ekspor. Kedua adalah pola perdagangan ikan yang mempunyai nilai ekonomi sedang. Pola perdagangan ini merupakan jaringan perdagangan lebih terbatas, yang meliputi terutama perdagangan antar daerah. Ketiga adalah pola perdagangan ikan yang mempunyai nilai ekonomi rendah. Jangkauan pemasarannya terbatas terutama pada pasar-pasar setempat. Meskipun dalam analisa pembahasan terhadap pola perdagangan tersebut dapat dilakukan secara terpilih, namun dalam realitanya, sering terjadi tumpang tindih. Sebagai contoh, perdagangan ikan tongkol dan ikan tengiri yang dalam kategori termasuk jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi sedang, sering diperdagangkan di pasar-pasar setempat.

Perdagangan ikan yang mempunyai nilai ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh perantara. Mereka tersebut dengan berbagai nama, antara lain disebut sebagai *langgan*, *suplier*, atau *penghubung*. Nama yang umum digunakan adalah perantara. Mereka, baik yang menggunakan modal sendiri ataupun modal dari perusahaan, berhubungan langsung dengan agen-agen eksportir ikan. Perantara ini terutama terdiri dari juragan pemilik perahu nelayan itu sendiri. Mereka mendaratkan ikan langsung ditempat-tempat yang telah ditentukan tanpa bersinggungan sedikitpun dengan TPI.

Sama dengan penjualan ikan yang mempunyai nilai tinggi, penjualan ikan yang mempunyai nilai ekonomi sedang dikuasai pula oleh perantara. Diantara mereka yang dominan juga juragan pemilik perahu. Berbeda dengan, penjualan ikan bernilai ekonomi tinggi, ikan-ikan janis ini umumnya didaratkan di TPI. Meskipun begitu, penjualan dilakukan bukan melalui lelang, tetapi langsung kepada pedagang ikan. Mereka hanya memberi retribusi yang diwajibkan kepada mereka. Kasus perahu nelayan mini jenis porse saine yang telah diberikan didepan merupakan contoh kongkrit dari pola penjualan jenis ini. Mereka melakukan transaksi di pelataran TPI, tetapi tidak melalui lelang. Harga jadi adalah harga kesepakatan antara perantara dan pedagang ikan.

Berbeda dengan kedua pola perdagangan di atas adalah perdagangan ikan yang rendah nilainya. Ikan jenis ini (ikan rucuh) biasanya di lelang di TPI. Akan tetapi, karena memang jenis ikan ini

murah harganya, pedagang ikan jenis rucah ini kurang mengesankan. Meskipun begitu, apabila tidak sedang musim ikan rucah, sering kali pedagang ikan seperti ini terjadi langsung kepada pedagang ikan. Pada saat seperti ini jumlah ikan rucuh sedikit, lebih sedikit dari jumlah yang diperlukan pedagang ikan.

Peranan perantara sangatlah dominan, dan mereka lah yang sebenarnya menguasai pasar. Nelayan terputus sama sekali dari aktivitas pasar. Bagi mereka hanyalah bekerja, berusaha keras untuk memperoleh tangkapan sebanyak mungkin, dan menyerahkan urusan penjualan ikan kepada perantara. Mereka juga tidak tahu, atau tahu tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, harga ikan yang sebenarnya. Mereka hanya menerima bagian berdasarkan harga yang ditetapkan oleh juragan. Pembangunan TPI, sebenarnya dilakukan untuk mendorong terjadinya penjualan ikan secara bebas. Akan tetapi dengan praktek-praktek penjualan ikan sebagaimana diuraikan di atas, perdagangan bebas yang diharapkan tidak terjadi. TPI di Karang Agung, daerah penelitian misalnya sampai saat ini benar-benar tidak berfungsi, meskipun ditempat itu perdagangan ikan terjadi setiap hari.

Pola pemilikan kelompok, sebagaimana yang diuraikan di atas, secara tidak langsung akan menjembatani nelayan kepada pasar. Mengapa? Peran juragan sebagai perantara dalam penjualan ikan sangat dominan. Apabila seorang nelayan ikut memiliki sarana produksi, mereka tidak lagi sepenuhnya sebagai nelayan buruh, akan tetapi berstatus juga sebagai juragan. Dengan demikian mereka tidak lagi dipermakai oleh perantara (juragan), tetapi ikut berstatus sebagai juragan, menikmati harga ikan sesuai dengan harga penjualan. Barangkali hampir bisa dipastikan, penjualan ikan melalui perantara, nelayan menerima harga ikan jauh dibawah harga yang sebenarnya.

4.4.2. Peningkatan Pendidikan Nelayan

Selain penilaian bahwa nelayan itu miskin, tidak dapat merencanakan sendiri kepentingannya untuk masa depan, nelayan sering juga disebut sebagai kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah. Sementara sebuah tesis yang sering muncul dibicarakan adalah bahwa untuk membangun ekonomi nelayan perlu ditingkatkan taraf pendidikan nelayan.

Apabila anggapan tersebut dianggap benar, apakah nelayan memang tidak memiliki perhatian pada pendidikan? Atau apakah usaha penangkapan ikan tidak memerlukan pendidikan yang cukup tinggi? Pendukung tesis diatas berasumsi bahwa meskipun keterampilan usaha penangkapan ikan tidak berhubungan langsung dengan

pendidikan pada umumnya, akan tetapi dengan pendidikan yang cukup, nelayan mampu mengembangkan wawasannya dalam memperluas usahanya. Melalui cara seperti ini, usaha penangkapan ikan dengan sendirinya akan dapat lebih berkembang.

Bila demikian halnya, peningkatan taraf pendidikan bukannya masalah yang spesifik untuk masyarakat nelayan. Barangkali memang susah dibantah bila seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki wawasan yang lebih luas. Akan tetapi hal itu berlaku untuk setiap orang, termasuk nelayan.

Barangkali kurang tepat bila dikatakan nelayan tidak memiliki perhatian pada pendidikan. Salah satu kasus menarik adalah komunitas nelayan di desa nelayan Gudang Lelang (Lampung). Secara ekonomi, tingkat kehidupan nelayan di desa ini cukup baik. Dengan kondisi seperti ini, mereka kurang disibukkan untuk berfikir bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mempunyai kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang lain, termasuk pendidikan. Demikianlah setidak-tidaknya yang ditunjukkan oleh nelayan di desa Gudang Lelang.

Dibidang pendidikan, nelayan di desa ini berhasil mendirikan sebuah yayasan pendidikan. Mereka berhasil membangun sekolah, berlantai dua, cukup besar dan mewah. Yayasan pendidikan ini diperuntukan terutama untuk mendidik anak-anak nelayan. Berdasarkan hasil pengamatan, anak-anak yang bersekolah si yayasan ini cukup banyak termasuk diantaranya adalah anak-anak bukan nelayan.

Keadaan ekonomi mereka yang memungkinkan mereka mampu mendirikan yayasan pendidikan. Tentu saja mereka tidak akan mampu melakukan itu bila tidak didukung oleh perekonomian yang memadai. Akan tetapi hal ini tidaklah berlaku hanya untuk nelayan. Siapapun orangnya, bila perekonomian mereka lemah mereka tidak bisa berbuat banyak untuk kepenting pendidikan. Singkatnya, bukan unsur nelayannya yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan nelayan, tetapi lebih dari itu adalah keadaan perekonomian mereka.

Pola pemilikan kelompok, sebagaimana yang telah diuraikan akan mendorong membaiknya perekonomian nelayan, dan yang selanjutnya akan mengangkat tingkat perekonomian mereka. Bila demikian, mereka dengan sendirinya akan mampu meningkatkan pendidikan mereka sendiri, menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah moderen. Keterkaitan antara pola pemilikan kelompok atas sarana penangkapan ikan, meningkatnya taraf hidup nelayan, dan membaiknya tingkat pendidikan dengan mudah dapat digarisankan. Masalahnya sebenarnya bukanlah pada perlu dan tidaknya pendidikan

bagi nelayan, tetapi yang mana yang terlebih dahulu harus ditangani, dengan pertimbangan mudah dilakukan, murah, dan strategis. Pengembangan pola pemilikan kelompok terhadap sarana produksi menawarkan strategi yang dimaksud.





BAB V

KESIMPULAN

LIPI

BAB V

KESIMPULAN

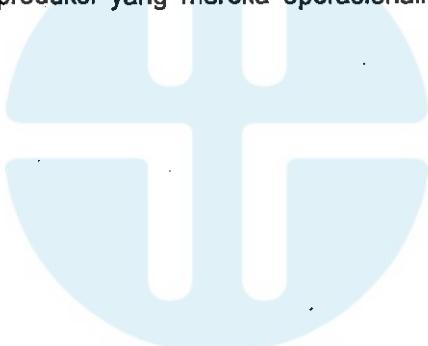
Uji coba model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan *valid* bahwa pola pemilikan kelompok atas sarana produksi mampu mendorong terjadinya pemerataan di kalangan nelayan dalam membagi hasil tangkapan. Dengan terjadinya pemerataan ini, lebih lanjut skala kelompok nelayan yang berpendapatan cukup akan semakin besar, mobilitas sosial ke atas terjadi semakin luas pada masyarakat, dan pada gilirannya, perekonomian nelayan secara keseluruhan akan meningkat.

Secara konseptual, telah dapat dibuktikan bahwa pola pemilikan kelompok (*sharing capital*) atas sarana produksi telah mendorong terjadinya pemerataan pendapatan di kalangan nelayan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari PEP-LIPI selama dua tahun berturut-turut pada berbagai komunitas nelayan telah membuktikan hal itu. Hal ini dilatar belakangi oleh tradisi sistem bagi hasil yang berlaku pada sebagian besar nelayan. Dalam tradisi sistem bagi hasil, pemilik sarana produksi (*juragan*) berhak menerima seboro bagian dari hasil tangkapan ditambah dengan beberapa persen untuk cadangan perbaikan sarana produksinya. Sebaliknya seboro sisanya dibagi diantara para buruh (*pandega*) yang menangkap ikan sesuai dengan tugasnya masing-masing di perahu. Semakin banyak jumlah pandega, maka semakin kecil bagian yang akan diterimanya. Di sini perbedaan antara pendapatan nelayan buruh dengan juragan. Karenanya, tradisi bagi hasil tersebut cenderung mengakibatkan terjadinya akumulasi modal pada sekelompok tertentu yaitu kelompok pemilik sarana produksi. Akan tetapi jika sistem bagi hasil dilakukan dalam konteks pola pemilikan kelompok berarti hasil bagi untuk pemilik sarana produksi tidak lagi mutlak dimiliki oleh seorang juragan, akan tetapi dibagi berdasarkan saham yang disertakan dalam kelompok penangkapan.

Data-data empiris dari model pemberdayaan yang diujicobakan oleh PEP-LIPI pada komunitas nelayan miskin di desa Kradenan, Kecamatan Palang, Tuban menunjukkan pula kecenderungan kepada kesimpulan yang sama. Bahwa pola pemilikan kelompok atas sarana produksi akan memberikan pendapatan yang lebih baik pada nelayan.

Akan tetapi seberapa jauh tingkat keberhasilan ataupun kegagalan uji model ini belum dapat dibuktikan secara empiris.

Berdasarkan aturan main pembagian pendapatan antara pemberi modal (dalam hal ini PEP-LIPI) dan nelayan yang terlibat dalam uji model tampak bahwa nelayan yang bersangkutan sedikit lebih baik dibandingkan apabila ia bekerja pada seorang juragan. Berdasarkan aturan main tersebut, seorang buruh nelayan akan mendapat 1 bagian, sesuai dengan sistem bagi hasil yang berlaku, atau sebesar bagian yang diterima apabila ia bekerja pada seorang juragan setempat. Bedanya, mereka mempunyai hak ikut memiliki dana cadangan untuk perbaikan, dan uang angsuran yang diserahkan kepada juragan (PEP) di perhitungkan sebagai uang angsuran. Berapa besar pendapatan yang diterima nelayan setiap kali melaut tentu saja tergantung pada banyak sedikitnya hasil tangkapan hari itu. Dengan demikian, Pendapatan mereka secara riil baru akan tampak meningkat apabila sarana produksi yang mereka operasionalkan telah terbayar lunas.



LIPI

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (ed), 1980. *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Jakarta, YIIS.
- Acheson, J.M, 1981. 'Anthropology of Fishing'. *Annual Review of Anthropology*, vol. 10.
- Astuty, Ernany Dwi, 1990. "Pendapatan, Pembagian Pendapatan, dan Mobilitas Vertikal Nelayan" dalam Masyhuri (ed), *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi; Telaahan Terhadap Sebuah Pendekatan*, Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI.
- Bannett, J.W, 1978. *The Ecological Transition : Cultural and Human Adaptation*. Pergamon Press Inc, New York.
- Bell, A.P, 1980. *Environmental Psychology*, W.B. Sanders Co, Philadelphia.
- Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tuban, 1999. *Laporan Tahunan 1998*.
- Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tuban, 1999. *Peluang Investasi Perikanan*.
- Firth, R, 1966. *Malay Fishermen. Their Peasant Economy*. Routledge & Keagan Paul Ltd, London.
- Hardin, G, 1968. 'The Tragedy of the Commons'. *Science*, vol. 162.
- Imron, M, 1997. " Peran Bos" dan Dampak Sosial Ekonomi Nelayan Rinca, *Masyarakat Indonesia*, 23, no. 2.
- Kantor Statistik Kabupaten Tuban, 1998. *Produksi Perikanan Laut Kabupaten Tuban 1997*.
- Kantor Statistik Kabupaten Tuban, 1998. *Produksi Perikanan Laut Kabupaten Tuban 1998*.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat , Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, CIDES.
- Kecamatan Palang, 1998. *Kecamatan Palang Dalam Angka 1998*.
- Masyhuri, 1996. *Menyisir Pantai Utara ; Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, Yokyakarta, Yayasan Pustaka Nusatama – Perwakilan KITLV.

- , 1998. "Distribusi Produksi : Institusi Perantara Dalam Pemasaran Ikan", dalam Masyhuri (ed), *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal : Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*, Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI.
- , 1998." Usaha Penangkapan Ikan di Jawa dan Madura : Produktivitas dan Pendekatan Buruh Nelayan", *Masyarakat Indonesia*, XXIV< no. 1.
- , 1999. "Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural", dalam Masyhuri (ed), *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi ; Telaahan Terhadap Sebuah Pendekatan*, Jakarta, Puslitbang ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI.
- , 1999. "Pendekatan Dalam Pemberdayaan Nelayan", dalam Masyhuri (ed), *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi ; Telaahan Terhadap Sebuah Pendekatan*, Jakarta, Puslitbang ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI.
- Mubyarto, at. al, 1994. *Nelayan dan Kemiskinan ; Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta Rajawali.
- Nadjib, Mochammad, 1993. "Karakteristik Sosial Budaya dan Masalah Perkoperasian Masyarakat Nelayan", *Masyarakat Indonesia*, no. 1 (20).
- , 1998. "Organisasi Produksi Dalam Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan", dalam Masyhuri (ed), *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal : Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*, Jakarta, Puslitbang ekonomi dan Pembangunan (PEP) – LIPI.
- Pramono, Hadi dan Abdon Nababan, 1997. "Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan". Makalah Seminar PMB – LIPI.
- Rahniema, M, 1995. "Partisipasi", W. Sachs (Penyunting). *Kritik atas Pembangunanisme*. Jakarta, CPSM.
- Rambo, A. T, 1983. *Conceptual Approaches to Human Ecology*. East-West Environmental and Policy Institute, Hawaii.
- Sawit, H. M, 1988. " Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa : Dilema Milik Bersama", *Masyarakat Indonesia*, no. 15.

- Scott, J.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press, New Haven.
- Sinaga, R.S. dan Benjamin White, 1980. " Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural", dalam Alfian (ed), *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Jakarta, YIIS.
- Soedjatmoko, 1980. "Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan", dalam Alfian (ed), *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Jakarta, YIIS.
- Soemardjan, S, 1980. "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan", dalam Alfian (ed), *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Jakarta, YIIS.
- Umbari, A, 1999. Pemberdayaan Nelayan Tertinggal", Makalah disampaikan pada Seminar Hasil-Hasil Penelitian PEP – LIPI, Jakarta 9-10 Maret.
- Vayda, A.P and Rappaport, R.A, 1968. 'Ecology : Cultural and Non Cultural'. J. A. Clifton (ed.). *Introduction to Cultural Anthropology*. Houghton Mifflin Company, Boston.
- _____ and Mc. Cay, 1975. 'New Direction in Ecology and Ecological Anthropology'. *Annual Review of Anthropology*. Vol.4.
- White, Benjamin, 1976. "Population, Involution and Employment in Rural Java", *Development and Change*, no. 7.

LIPI



LIPI